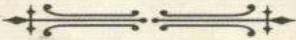




# KOTA-KOTA DI JAWA

IDENTITAS, GAYA HIDUP DAN PERMASALAHAN SOSIAL

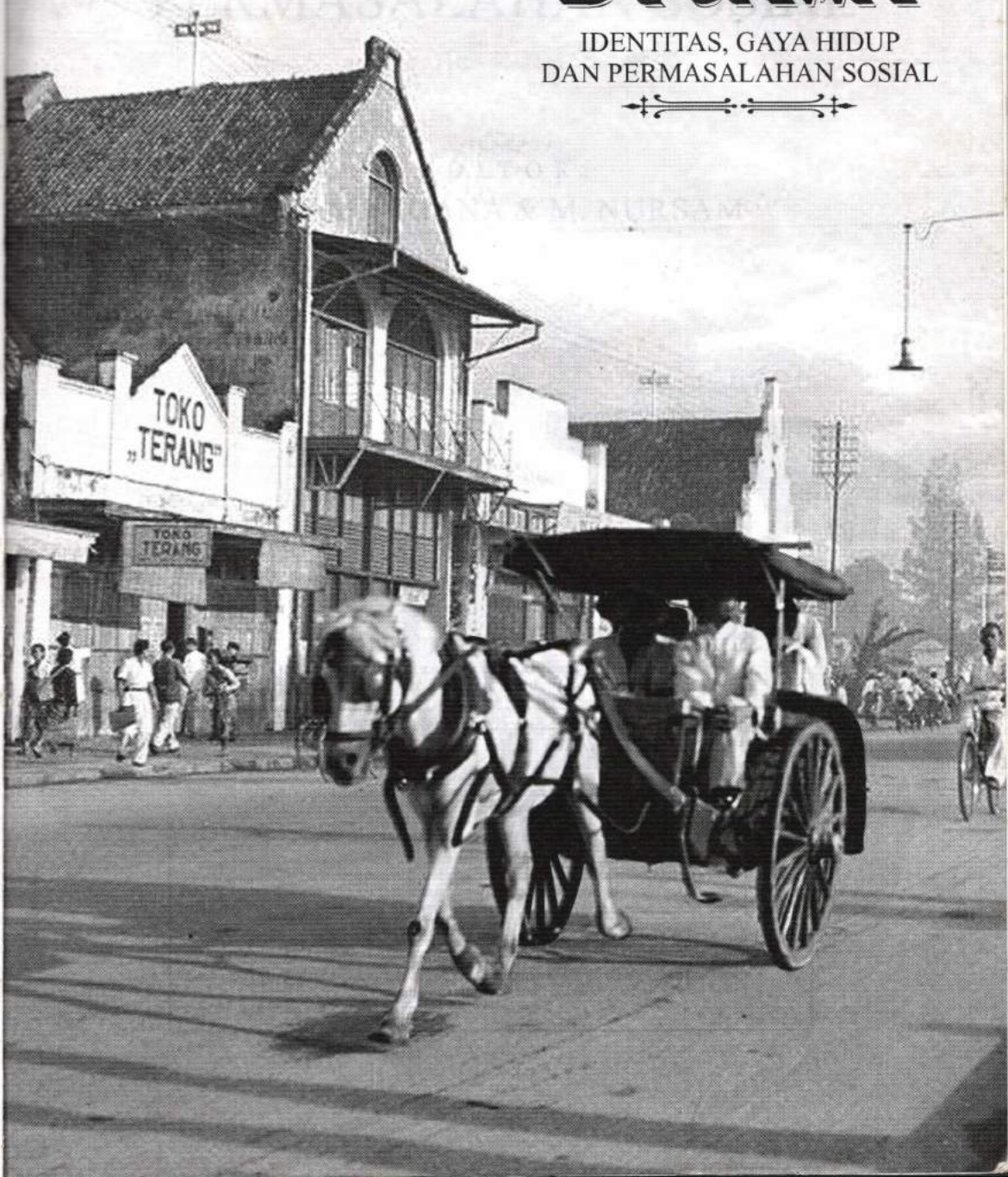


EDITOR  
SRI MARGANA & M. NURSAM



  
**KOTA  
KOTA  
DI JAWA**

IDENTITAS, GAYA HIDUP  
DAN PERMASALAHAN SOSIAL





# KOTA-KOTA AWAL

IDENTITAS DAN PERMASALAHAN

# KOTA-KOTA IDENTITAS, PERMASALAHAN

SRI MAR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

#### Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

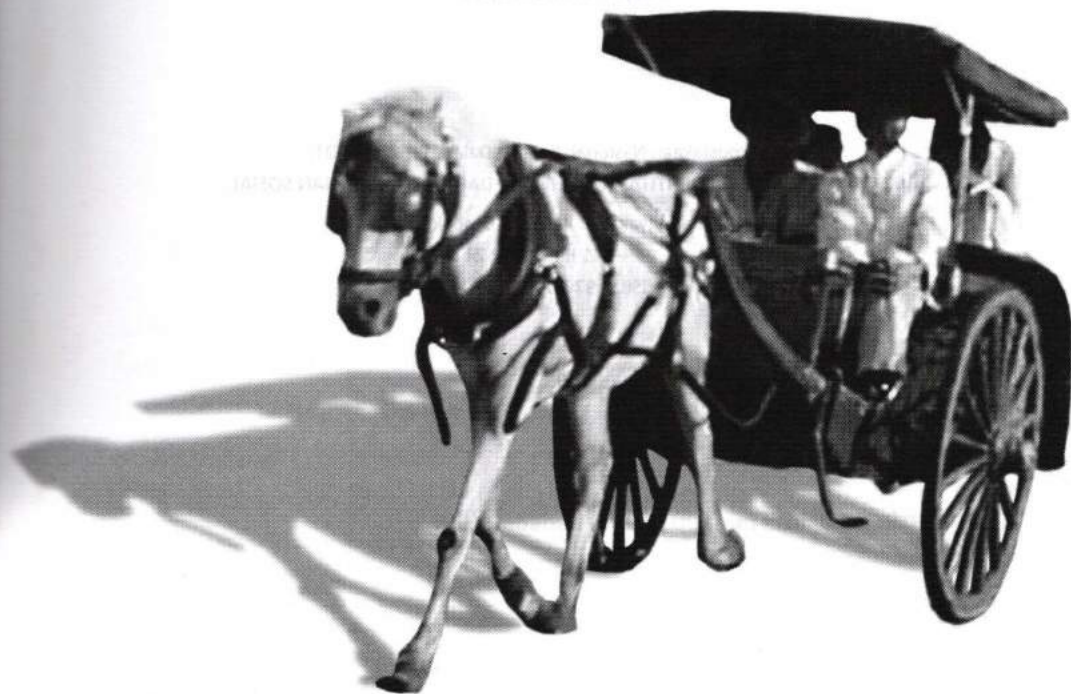




# KOTA-KOTA DI JAWA

## IDENTITAS, GAYA HIDUP DAN PERMASALAHAN SOSIAL

EDITOR :  
SRI MARGANA & M. NURSAM



PENERBIT OMBAK  
2010

Hak Cipta

Hak Cipta untuk mengumumkan  
setelah suatu ciptaan dilahirkan  
undang-undangan yang berlaku.

sebagaimana dimaksud dalam  
pidana penjara masing-masing  
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau  
paling banyak Rp 5.000.000,00

mengeksploitasi, atau menjual kepada  
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana  
paling lama 5 tahun dan/ atau denda





# KOTA-KOTA DI JAWA

KOTA-KOTA DI JAWA: IDENTITAS, GAYA HIDUP DAN PERMASALAHAN SOSIAL

# IDENTITAS, GAYA HIDUP DAN PERMASALAHAN SOSIAL

Copyright@Penerbit Ombak, 2010

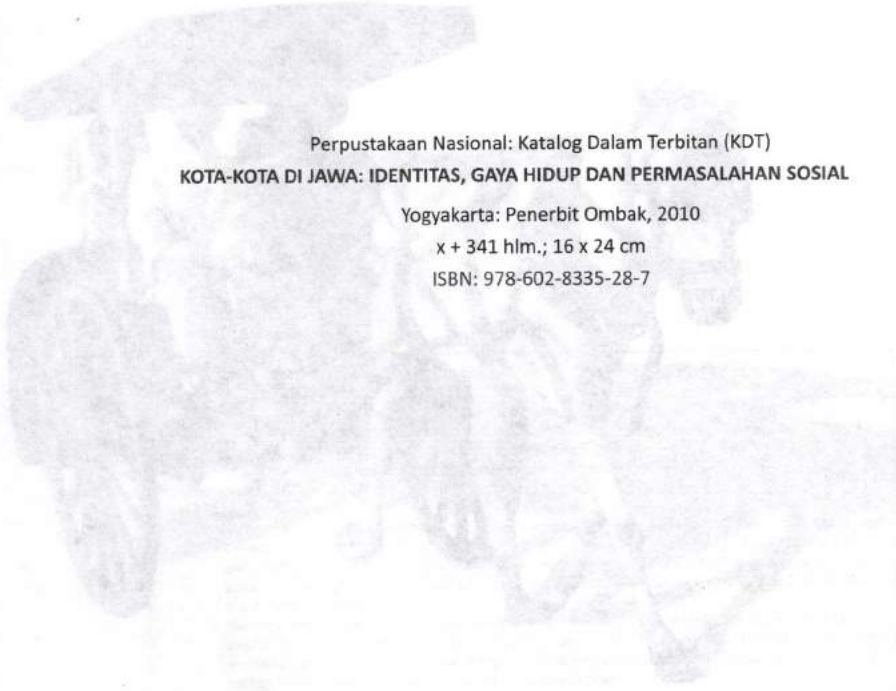
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Ombak, 2010  
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292  
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606  
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

PO.130.01-'10

Penyunting: Sri Margana & M. Nursam  
Tataletak: Turatea Kreatif  
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
KOTA-KOTA DI JAWA: IDENTITAS, GAYA HIDUP DAN PERMASALAHAN SOSIAL

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010  
x + 341 hlm.; 16 x 24 cm  
ISBN: 978-602-8335-28-7



PENERBIT OMBAK

## BAGIAN III

### PERMASALAHAN SOSIAL

1. ... di Tengah ...  
... di Kota ...  
...  
133
2. ...  
...  
157
3. ...  
...  
157
4. ...  
...  
Langgeng Suisetyo B...

## BAGIAN IV

### URBANISASI, PELABUHAN DAN

1. Urbanisasi dan ...  
...  
Akhir Abad ke-19 ...  
Sarjana Sigit Wahyu ...
2. Management and ...  
...  
Indrianto ... 201
3. Pasar Tenaga Kerja ...  
...  
di Pelabuhan ...  
Bazief ... 237

## BAGIAN V

### DINAMIKA POLITIK DAN

1. "Marx House" ...  
...  
Sebuah Studi ...  
...  
Sebuah ...  
...  
Indonesia di ...  
Purnawati ...
2. Memerahkan ...  
...  
Indonesia di ...  
Purnawati ...

# KOTA-KOTA PERMASALAHAN SOSIAL

## IDENTITAS PERMASA

2010  
Ombak, 2010  
Jakarta 55292  
620606  
co.id

SRI MAR

ursam

m Terbitan (KDT)  
PERMASALAHAN SOSIAL

ak, 2010  
m  
-7

### DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

### BAB I

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

### BAB II

1. ...
2. ...
3. ...

Persembahan untuk 70 Tahun Prof. Dr. Djoko Suryo

## DAFTAR ISI

### PENGANTAR EDITOR ~ ix

### PENDAHULUAN

Sri Margana dan Ummi Barjiyah ~ 1

### BAGIAN I

#### IDENTITAS KOTA ~ 17

1. Runtuhnya Sebuah Kejayaan: Kota Banyumas 1900—1937  
Prima Nurrahmi Mulyasari ~ 19
2. Jati Diri Kota Solo: Persoalan Sebuah Kota di Jawa  
Susanto ~ 35
3. Imlek Gaya Yogya: Perspektif Kultural Struktural  
Heddy Shri Ahimsa-Putra ~ 49
4. Dari Pakeliran Adiluhung ke Pakeliran Glamor-Spektakuler:  
Pertunjukan Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta dalam  
Perubahan Budaya  
Dhanang Respati Puguh ~ 65

### BAGIAN II

#### GAYA HIDUP PERKOTAAN ~ 85

1. Citra Perempuan dalam Pariwara di Hindia Belanda 1900—1942  
Widya Fitrianiingsih ~ 87
2. Biro Perkawinan dalam Sejarah Keluarga Jawa Awal Abad ke-20  
Mutiah Amini ~ 107
3. Kain Kebaya dan Rok: Pakaian Perempuan Yogyakarta  
Awal Abad ke-20  
Dwi Ratna Nurhajarini ~ 117

### BAGIAN III

#### PERMASALAHAN SOSIAL PER

1. Yang Tersisa di Tengah  
Kaum Miskin di Kota  
Reza Hudianto ~ 133
2. Perilaku Aborsi Masa  
Gayung Kusuma ~ 143
3. Perubahan dan Keber  
di Jawa Sejak Kolonia  
Baha'uddin ~ 157
4. Perkembangan Fasilitas  
Rumah Sakit dan Sek  
Langgeng Sulistyio Bu

### BAGIAN IV

#### URBANISASI, PELABUHAN DA

1. Urbanisasi dan Migr  
Akhir Abad ke-19 da  
Sarjana Sigit Wahyu  
2. Management and St  
Indrianto ~ 201
3. Pasar Tenaga Kerja,  
di Pelabuhan Tanjun  
Razief ~ 237

### BAGIAN V

#### DINAMIKA POLITIK DAN EKO

1. "Marx House": Kelo  
Sebuah Studi Awal  
Budiawan ~ 261
2. Memerahkan Kota F  
Indonesia di Kota Su  
Purnawan Basundor



**BAGIAN III****PERMASALAHAN SOSIAL PERKOTAAN ~ 131**

1. Yang Tersisa di Tengah Kemajuan:  
Kaum Miskin di Kota Malang 1916—1950  
Reza Hudianto ~ 133
2. Perilaku Aborsi Masa Kolonial di Jawa  
Gayung Kusuma ~ 143
3. Perubahan dan Keberlanjutan: Pelayanan Kesehatan Swasta  
di Jawa Sejak Kolonial sampai Pascakemerdekaan  
Baha'uddin ~ 157
4. Perkembangan Fasilitas Sosial Perkotaan Awal Abad ke-20:  
Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta  
Langgeng Sulistyو Budi ~ 177

**BAGIAN IV****URBANISASI, PELABUHAN DAN TENAGA KERJA ~ 187**

1. Urbanisasi dan Migrasi di Keresidenan Surabaya  
Akhir Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20  
Sarjana Sigit Wahyudi ~ 198
2. Management and Stevedores in the Surabaya Port 1950—1980  
Indrianto ~ 201
3. Pasar Tenaga Kerja, Pengawasan dan Upah  
di Pelabuhan Tanjung Priok 1920—1930-an  
Razief ~ 237

**BAGIAN V****DINAMIKA POLITIK DAN EKONOMI ~ 259**

1. "Marx House": Kelompok Studi Kiri Pada Awal Revolusi  
Sebuah Studi Awal  
Budiawan ~ 261
2. Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis  
Indonesia di Kota Surabaya 1955—1965  
Purnawan Basundoro ~ 271



- 3. Kemajoean Ekonomi Indonesia (1941—1949): Rise and Fall of a Pribumi Muslim Economic Organization from Yogyakarta Didi Kwartanada ~ 293
- 4. Padvinders, Pandu, Pramuka Kepemudaan dan Kenegaraan Indonesia pada Abad ke-20 Pujo Semedi ~ 319

INDEKS ~ 340

PENGANTAR

PENDAHULUAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

BAB XVIII

BAB XIX

BAB XX

BAB XXI

BAB XXII

BAB XXIII

BAB XXIV

BAB XXV

BAB XXVI

BAB XXVII

BAB XXVIII

BAB XXIX

BAB XXX

BAB XXXI

BAB XXXII

BAB XXXIII

BAB XXXIV

BAB XXXV

BAB XXXVI

BAB XXXVII

BAB XXXVIII

Buku yang hadir di had yang dipersembahkan kepada Jurusan Sejarah Fakultas memperingati hari ulang tahun 2009. Artikel-artikel ini disu sastra yang sebagian besar a Jumlah keseluruhan artikel a Pada awalnya artikel-artikel karena jumlah artikel yang di menerbitkan dalam dua buah dan Global dan Kota-Kota a Sosial.

Prof. Dr. Djoko Suryo ada yang hingga usianya yang ke sejarah. Bersamaan dengan karangan Prof. Djoko Suryo y tentang sejarah dan kebudaya penelitian dan penulisan s memperoleh gelar Ph.D, da Tema-tema politik, ekonomi, artikel-artikel, dan kuliah-ku topik sejarah ini tampaknya untuk mengembangkan tem Keragaman topik yang disu menunjukkan pengaruh itu.

Editor buku ini menguc para penyumbang artikel, y mendukung terbitnya buku menunjukkan besarnya antu pengembangan ilmu sejarah

## PENGANTAR EDITOR

Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini adalah sekumpulan artikel yang dipersembahkan kepada Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Ilmu Sejarah pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-70 yang jatuh pada 30 Desember 2009. Artikel-artikel ini disumbangkan oleh para sejarawan, antropolog dan ahli sastra yang sebagian besar adalah mantan murid dan kolega Prof. Djoko Suryo. Jumlah keseluruhan artikel ada 45 buah dengan topik tulisan yang beragam. Pada awalnya artikel-artikel ini akan diterbitkan dalam satu jilid buku, tetapi karena jumlah artikel yang disumbangkan begitu banyak maka diputuskan untuk menerbitkan dalam dua buah jilid buku, yakni *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global* dan *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*.

Prof. Dr. Djoko Suryo adalah salah satu generasi sejarawan senior Indonesia yang hingga usianya yang ke-70 ini masih aktif mengajar, meneliti, dan menulis sejarah. Bersamaan dengan penerbitan dua buku ini juga diterbitkan kumpulan karangan Prof. Djoko Suryo yang mengulas dan mengaji berbagai topik penting tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Ia mengawalinya dengan menekuni penelitian dan penulisan sejarah sosial dan pedesaan, kemudian setelah memperoleh gelar Ph.D, dari Monash University, minatnya itu semakin luas. Tema-tema politik, ekonomi, dan kebudayaan yang telah mewarnai buku-buku, artikel-artikel, dan kuliah-kuliahnya. Minatnya yang luas terhadap berbagai topik sejarah ini tampaknya telah menginspirasi para murid dan koleganya untuk mengembangkan tema-tema baru dalam penulisan sejarah Indonesia. Keragaman topik yang disumbangkan oleh para penulis artikel di buku ini menunjukkan pengaruh itu.

Editor buku ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyumbang artikel, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendukung terbitnya buku ini. Banyaknya artikel yang disumbangkan ini menunjukkan besarnya antusiasme dan komitmen masyarakat akademis bagi pengembangan ilmu sejarah dan humaniora, sekaligus penghargaan yang tinggi



kepada Prof. Dr. Djoko Suryo yang telah mengabdikan ilmu dan pemikirannya bagi pengembangan sejarah dan studi sejarah di Indonesia.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Saudara M. Nursam dari Penerbit Ombak yang berkenan untuk menerbitkan kedua buku ini. Ombak telah mengukir reputasinya yang luar biasa dengan komitmennya yang sangat besar bagi penerbitan buku-buku humaniora, terutama buku-buku sejarah. Persiapan penerbitan buku ini telah melibatkan para *volunteers* yang telah bekerja keras untuk mengorganisir pengumpulan artikel, menyeleksi, mengedit dan memperbaiki beberapa kesalahan teknis penulisan. Kepada Widya Fitrianiingsih, Uji Nugroho, Ahmad Nashih Luthfi, Umi Barjiyah dan Reni Nuryanti diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Dukungan yang besar bagi penerbitan buku ini juga didapatkan dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Kepada Bapak Drs. Ahmad Adaby Darban S.U., ketua Jurusan Sejarah, Bapak Baha'uddin, M.Hum, Sekretaris Jurusan, dan Ibu Rika Sayekti diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kritik, saran, dan nasehat-nasehat berharga untuk persiapan penerbitan buku ini juga diberikan oleh Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A. dan juga dosen-dosen lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih khusus kepada Drs. Dhanang Respati Puguh, M.Hum yang telah menggubah tembang *Dhandanggula Pisungsung* kepada Prof. Dr. Djoko Suryo.

Semoga hadirnya kedua buku ini dapat menjadi kado yang istimewa bagi Ulang Tahun Prof. Dr. Djoko Suryo yang ke-70 dan memberi manfaat yang berharga bagi upaya mengembangkan studi sejarah di Indonesia. Akhirnya, Selamat Ulang Tahun yang ke-70 kepada Prof. Dr. Djoko Suryo, semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Masyarakat masih menunggu pemikiran-pemikiran kritis dan jernih dari Bapak untuk memberikan semangat dan inspirasi dalam mengembangkan studi sejarah dan humaniora di Indonesia.

Yogyakarta, 30 Desember 2009

Sri Margana

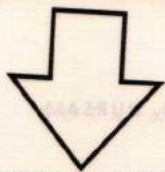
KOTA-KOTA D  
DAN  
Sri

Studi tentang sejarah p  
yang sangat pesat. Perker  
perkembangan kontempore  
kebudayaan yang mulai berg  
mulai bergerak menuju sebu  
lama. Perubahan ini hasil da  
awal abad ke-20. Kosmopolita  
benda-benda simbol mode  
perkotaan. Pembangunan im  
memenuhi selera kosmopolit  
dianggap kuno dan ketinggal  
di kota-kota tua, seperti Solo d  
ini menjadi tema pokok dari  
Respati Puguh dan Heddy Sh  
Susanto dan Prima menangk  
di Yogyakarta Heddy justru  
tradisi lama yang telah hilang  
Tema lain yang mena  
perkotaan adalah tentang ga  
urban dapat dilihat dari perfo  
juga dari orientasi kultural n  
sosial baru yang memiliki a  
Yogyakarta kembali menjadi o  
orientasi gaya hidup masyara  
perubahan gaya berpakaian  
tetapi juga menggambarkan  
negara. Pakaian juga mence



**SIGN  
HERE**

*Tanda Tangan Disini*



## **MEMERAHKAN KOTA PAHLAWAN: PERGULATAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI KOTA SURABAYA 1955—1965**

Purnawan Basundoro<sup>1</sup>

### **Pengantar**

Pascakemerdekaan Indonesia, salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu dibuktikan dalam Pemilihan Umum 1955 dimana partai tersebut secara nasional meraih suara 16,4 persen dan menguasai 15,2 persen kursi di parlemen.<sup>2</sup> Keberhasilan PKI memenangkan pertarungan politik di tingkat nasional tidak bisa dipisahkan dengan strategi partai ini dalam menggalang kekuatan di pedesaan. Memasuki 1950, PKI mulai serius menggarap kekuatan massa dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan mendekati organisasi-organisasi massa yang sepaham seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat. Dengan usahanya yang sangat intensif tersebut maka dalam waktu yang tidak begitu lama jumlah massa PKI meningkat sangat tajam. Pada 1954, misalnya, dilaporkan bahwa jumlah anggotanya sudah mencapai 500.000 orang, dan satu tahun kemudian sudah melonjak menjadi 1.000.000 orang.

BTI adalah organ partai yang paling serius menggarap massa. Indonesia sebagai negara agraris memiliki struktur sosial yang sangat menguntungkan organisasi ini dimana profesi petani merupakan profesi terbesar di Indonesia. Dengan menggarap isu-isu pembagian tanah untuk petani, maka jumlah anggota BTI mengalami peningkatan secara simultan. Jika pada 1953 jumlah anggota yang dilaporkan hanya 360.000 orang, maka pada akhir 1955 jumlah anggotanya

<sup>1</sup> Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>2</sup> Pada Pemilihan Umum 1955 PKI berhasil meraih suara sebanyak 6.176.914 secara nasional dan menduduki urutan ke-4 setelah PNI, Masyumi, dan NU. Keempat partai tersebut kemudian mendapat julukan "Empat Besar". Perolehan suara yang sangat besar tersebut cukup mengejutkan karena pasca Peristiwa Madiun 1948 PKI diposisikan sebagai musuh bangsa. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 496.



sudah melonjak sembilan kali lipat.<sup>3</sup> Setelah partai ini berpaling ke Cina, nampaknya mereka lebih serius menggarap massa pedesaan daripada massa perkotaan. Struktur sosial masyarakat Indonesia dimana petani menduduki peringkat tertinggi menjadi penentu keberhasilan PKI dalam mencari dukungan massa. Namun demikian bukan berarti partai ini gagal dalam menggarap massa perkotaan. Pada Pemilihan Umum 1955 PKI berhasil meraup suara 42 persen di Kota Surabaya dan menjadi partai pemenang pemilu di kota ini. Hal ini cukup mengejutkan karena secara kultural masyarakat Kota Surabaya lebih dekat dengan kultur Nahdatul Ulama (NU), namun justru partai NU hanya meraih peringkat kedua di kota ini.<sup>4</sup> Bagaimana strategi PKI dalam meraih dukungan massa di Kota Surabaya?

### Menuju Kemenangan

Menjelang Pemilihan Umum 1955 gerakan PKI untuk menguasai Kota Surabaya dengan cara memenangkan pemilihan umum semakin agresif. Seluruh elemen partai mulai dari Komite Seksi (CS) di tingkat Kota Besar, Komite Sub Seksi (CSS) di tingkat kecamatan, sampai Komite Ranting (CR) di tingkat lingkungan (*wijk*) atau pabrik serentak bergerak.<sup>5</sup> Tindakan yang paling sederhana misalnya dengan memasang tanda gambar partai di kampung-kampung, rapat-rapat partai di tingkat Komite Ranting, pertemuan-pertemuan organisasi massa seperti BTI, SOBSI, Gerwis, Gerwani, dan lain-lain. Gerakan mereka yang amat agresif tidak jarang menimbulkan gesekan dengan warga kampung atau dengan partai lain. Pemasangan tanda gambar partai di Kampung Kebondalem, Surabaya mendapat reaksi keras dari warga kampung setempat. Mereka menolak pemasangan gambar "palu arit" di kampung tersebut dengan alasan bahwa Kampung Kabondalem tidak mau di PKI-kan.<sup>6</sup> Para pemuda dan orang tua ramai-ramai mendatangi ketua Rukun Kampung (RK) dan menuntut agar gambar palu arit

<sup>3</sup> Lonjakan jumlah anggota tidak hanya terjadi di BTI tetapi juga di Pemuda Rakyat. Pada 1954 organisasi ini hanya memiliki anggota sebanyak 202.605 orang tetapi pada akhir 1955 naik menjadi 616.605 orang. *Ibid.*, hlm. 492—493.

<sup>4</sup> H.W. Dick, *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000* (Athens: Ohio University Press, 2002), hlm. 99.

<sup>5</sup> Untuk struktur PKI dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah lihat Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm. 76.

<sup>6</sup> "Kampung Kebondalem tak mau di PKI-kan", *Perdamaian*, 2 Mei 1955.

yang tertempel di kampung ters... oleh pemasang gambar. Bahkan berwajib balik bertanya bahwa banyak dipasang tidak diributk... paksa oleh warga kampung den... Penolakan terhadap gamb... Kebondalem, tetapi juga di Kamp... lain. Di Simolawang misalnya, ta... manusia.<sup>7</sup> Tindakan tersebut na... terjadi di Gresik yaitu tindakan... dan tanda gambar "NU" dengan... tersebut dengan sapi. Padahal... dan beberapa di pasang di dep... terjadi antara PKI di satu sisi de... ideologis partai-partai tersebut... Di Kampung Srenggan gambar... gambar Masjumi. Tidak jarang g... kekerasan fisik. Sebagai contoh... orang yang berjumlah kurang leb... pada 5 Mei 1955 jam sebelas r... mencabuti tanda gambar PKI. PKI sampai berani pasang lagi ta... Tindakan tersebut membuat wak... naik pitam. Ia menuntut pihak ya... bertanggungjawab tersebut.<sup>9</sup>

Upaya "mengganggu" PKI d... 1955 ibarat membenturkan... teramat kuat di Kota Surabaya. Ia... juga memiliki lobi yang kuat ke be... yang menimpa dirinya Komite Sek... segan mengadu kepada wali kot...

<sup>7</sup> "Keterangan PKI sekitar Pentjabuta

<sup>8</sup> "Gedjala2 Tak Sehat", *Perdamaian*,

<sup>9</sup> "Keterangan PKI sekitar...., *op.cit.*



SIGMA  
HERB  
Tanda Tangan

NURSAM

h partai ini berpaling ke Cina, massa pedesaan daripada massa esia dimana petani menduduki an PKI dalam mencari dukungan ni gagal dalam menggarap massa hasil meraup suara 42 persen di pemilu di kota ini. Hal ini cukup kat Kota Surabaya lebih dekat stru partai NU hanya meraih gi PKI dalam meraih dukungan

an PKI untuk menguasai Kota umum semakin agresif. Seluruh at Kota Besar, Komite Sub Seksi ting (CR) di tingkat lingkungan ang paling sederhana misalnya ng-kampung, rapat-rapat partai organisasi massa seperti BTI, ereka yang amat agresif tidak pung atau dengan partai lain. ondalem, Surabaya mendapat ereka menolak pemasangan an alasan bahwa Kampung a dan orang tua ramai-ramai untut agar gambar palu arit

ni juga di Pemuda Rakyat. Pada 1954 tetapi pada akhir 1955 naik menjadi

History, 1900-2000 (Athens: Ohio

ang paling rendah lihat Arbi Sanit, n Jawa Timur (Yogyakarta: Pustaka

, 2 Mei 1955.

yang tertempel di kampung tersebut dicabut. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh pemasang gambar. Bahkan ketika mereka mendatangi yang berwajib, pihak berwajib balik bertanya bahwa di kampung-kampung lain gambar palu arit yang banyak dipasang tidak diributkan. Akhirnya gambar-gambar tersebut dicabut paksa oleh warga kampung dengan disaksikan aparat kepolisian.

Penolakan terhadap gambar palu arit tidak hanya terjadi di Kampung Kebondalem, tetapi juga di Kampung Srenggenan, Sidodadi, Simolawang, dan lain-lain. Di Simolawang misalnya, tanda gambar palu arit dilempari dengan kotoran manusia.<sup>7</sup> Tindakan tersebut nampaknya reaksi dari kejadian sebelumnya yang terjadi di Gresik yaitu tindakan penistaan terhadap tanda gambar "Masjumi" dan tanda gambar "NU" dengan mengotori tanda gambar yang berukuran besar tersebut dengan sapi. Padahal gambar tersebut dipasang di tempat strategis dan beberapa di pasang di depan madrasah.<sup>8</sup> Gesekan paling tajam memang terjadi antara PKI di satu sisi dengan Masjumi dan NU di sisi yang lain. Secara ideologis partai-partai tersebut memang memiliki perbedaan yang amat tajam. Di Kampung Srenggenan gambar-gambar PKI dicopoti kemudian diganti dengan gambar Masjumi. Tidak jarang gesekan antar partai menjurus kepada tindakan kekerasan fisik. Sebagai contoh misalnya, di Kampung Sidodadi serombongan orang yang berjumlah kurang lebih 75 orang dengan membawa tiga buah becak, pada 5 Mei 1955 jam sebelas malam berjalan-jalan keliling kampung sambil mencabuti tanda gambar PKI. Mereka juga mengeluarkan ancaman: "Kalau PKI sampai berani pasang lagi tanda gambar tersebut akan dihabisi djiwanja." Tindakan tersebut membuat wakil dari PKI Kota Besar Surabaya, Bardi Harsono, naik pitam. Ia menuntut pihak yang berwajib menindak orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut.<sup>9</sup>

Upaya "mengganggu" PKI di Kota Surabaya menjelang Pemilihan Umum 1955 ibarat membenturkan kepala ke tembok. Pada periode ini PKI sudah teramat kuat di Kota Surabaya. Ia tidak hanya memiliki masa yang besar, tetapi juga memiliki lobi yang kuat ke berbagai pihak. Menanggapi berbagai gangguan yang menimpa dirinya Komite Seksi (Secom) PKI Kota Besar Surabaya tidak segan-segan mengadu kepada wali kota. Mereka meminta agar wali kota bertindak

<sup>7</sup> "Keterangan PKI sekitar Pentjabutan Tanda Gambar", *Perdamaian*, 11 Mei 1955.

<sup>8</sup> "Gedjala2 Tak Sehat", *Perdamaian*, 3 Mei 1955.

<sup>9</sup> "Keterangan PKI sekitar....", *op.cit.*



tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan sabotase terhadap PKI.<sup>10</sup> Bahkan PKI berhasil menggalang solidaritas antar partai yang se-ideologi agar bersama-sama melakukan pencegahan terhadap pihak-pihak yang akan mengganggu mereka. Bertempat di gedung KMKB di Jalan Mas Mansyur Surabaya dilaksanakan rapat persatuan antara organisasi-organisasi dan partai-partai di Lingkungan Ampel, Kampung Baru, Nyamplungan, Ujung, dan Semampir. Mereka bersepakat bersama-sama dengan militer dan polisi untuk bersama-sama menghadapi setiap orang yang bermaksud mengotori atau merusak tanda gambar partai yang dipasang di kampung-kampung.<sup>11</sup>

Suasana menjelang pemilihan umum, suasana Kota Surabaya terasa amat panas. Pertikaian antarpolisi terutama antara PKI dan Masjumi terus-menerus terjadi. Konferensi pers yang dilakukan oleh PKI yang diwakili oleh Bardi Harsono mendapat reaksi keras dari pihak Masjumi. Masjumi tidak ingin dituduh sebagai pihak yang memperkeruh situasi politik Kota Surabaya dengan mencabuti tanda gambar palu arit milik PKI. Mereka bahkan balik menuduh bahwa PKI-lah yang terlalu agresif dengan memasang target bahwa pemilu yang akan datang tujuan PKI adalah mengalahkan Masjumi baik di Kota Surabaya maupun secara nasional. Pihak Masjumi mengatakan bahwa tidak ada partai/golongan lain yang mendahului dan dengan sengaja menyerang dan menanamkan benih-benih kebencian serta perpecahan kecuali PKI.<sup>12</sup> Untuk memperlihatkan kekuatan Masjumi kepada PKI maka dengan memanfaatkan momen Syawalan (Halal Bi Halal) Masjumi mengadakan "Silaturrachmi Sjawalan" besar-besaran dengan mengundang seluruh anggota dan anggota istimewa pada 29 Mei bertempat di "Gedung Jajasan Taman Kebudajaan". Acara tersebut diisi pidato politik oleh R. Muljadi Djojomartono dari Solo.<sup>13</sup>

Silaturrachmi Sjawalan yang diadakan oleh Masjumi berhasil memprovokasi PKI. PKI naik darah melihat Masjumi berhasil mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Tidak mau kalah dengan Masjumi, PKI pun melakukan penggalangan massa besar-besaran, jauh lebih besar dari yang telah dilakukan oleh Masjumi. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PKI yang ke-35 maka pada 29 Mei 1955 diadakan rapat raksasa bertempat di Lapangan Tambakredjo. Pertemuan

<sup>10</sup> "Delegasi PKI Menemui Wali kota Mustadjab", *Perdamaian*, 14 Mei 1955.

<sup>11</sup> "Bersatu...", *Perdamaian*, 14 Mei 1955.

<sup>12</sup> "Masjumi tak Menginginkan Pentjabutan2 Tanda Gambar", *Perdamaian*, 17 Mei 1955.

<sup>13</sup> "Masjumi Adakan Silaturrachmi", *Perdamaian*, 26 Mei 1955.

besar-besaran tersebut dihadiri simpatisan PKI Kota Surabaya.<sup>14</sup> oleh wakil dari Komite Central politik antara lain Soelami dari *show of force* dari seluruh keku tantangan yang ditujukan kepada baik siang maupun malam, ka Kebudajaan Surabaya diadakan Politbiro CC PKI Soedisman.<sup>15</sup> Pa Tambakredjo, Soedisman secara dilakukan oleh lawan-lawan poli aksi-aksi tersebut tidak memil mengancam eksistensi kabinet.<sup>16</sup>

Pertemuan ini seolah-olah dengan lawan-lawan politiknya o pertarungan yang sesungguhnya raksasa tersebut PKI Kota Surab besar dalam menghadapi pem tidak melakukan tindakan provol PKI juga menemukan kepercayaan Agung menyetujui usul PKI aga jatuh pada 18 September tidak Agung turun setelah delegasi PK Persetujuan Jaksa Agung menunj menjadi kekuatan yang sebenarnya pemilihan umum. Kritik tajam IPKI (Ikatan Pendukung Kemerde agar 18 September tetap diperi sebagai organisasi yang sebagian merupakan salah satu organisasi y

<sup>14</sup> "Rapat Raksasa PKI", *Perdamaian*,

<sup>15</sup> "Tjeramah di Taman Kebudajaan",

<sup>16</sup> "Rapat Raksasa...", *op.cit.*

<sup>17</sup> "Rakjat Indonesia Harus Tetap P 1955.



otase terhadap PKI.<sup>10</sup> Bahkan PKI  
g se-ideologi agar bersama-sama  
ang akan mengganggu mereka.  
ur Surabaya dilaksanakan rapat  
tai-partai di Lingkungan Ampel,  
emampir. Mereka bersepakat  
uk bersama-sama menghadapi  
merusak tanda gambar partai  
ana Kota Surabaya terasa amat  
KI dan Masjumi terus-menerus  
ang diwakili oleh Bardi Harsono  
umi tidak ingin dituduh sebagai  
Surabaya dengan mencabuti  
balik menuduh bahwa PKI-lah  
hwa pemilu yang akan datang  
Kota Surabaya maupun secara  
ada partai/golongan lain yang  
an menanamkan benih-benih  
uk memperlihatkan kekuatan  
an momen Syawalan (Halal Bi  
walan" besar-besaran dengan  
ewa pada 29 Mei bertempat di  
ebut diisi pidato politik oleh R.  
asjumi berhasil memprovokasi  
umpulkan massa dalam jumlah  
un melakukan penggalangan  
elah dilakukan oleh Masjumi.  
yang ke-35 maka pada 29 Mei  
gan Tambakredjo. Pertemuan

Perdamaian, 14 Mei 1955.

Perdamaian, 17 Mei 1955.

besar-besaran tersebut dihadiri oleh barisan buruh, tani, pemuda, anggota dan simpatisan PKI Kota Surabaya.<sup>14</sup> Tidak tanggung-tanggung acara tersebut dihadiri oleh wakil dari Komite Central (CC) PKI Soedisman. Ikut memberikan pidato politik antara lain Soelami dari Gerwani. Rapat raksasa tersebut bisa dikatakan *show of force* dari seluruh kekuatan PKI Kota Surabaya untuk menjawab semua tantangan yang ditujukan kepada PKI. Hari itu Kota Surabaya menjadi milik PKI baik siang maupun malam, karena pada malam hari di gedung Jajasan Taman Kebudajaan Surabaya diadakan ceramah umum dengan pembicara anggota Politburo CC PKI Soedisman.<sup>15</sup> Pada pidatonya yang membakar masa di Lapangan Tambakredjo, Soedisman secara berapi-api mengecam tindakan kotor yang dilakukan oleh lawan-lawan politik PKI di Kota Surabaya. Ia mengatakan bahwa aksi-aksi tersebut tidak memiliki dasar dan dapat merugikan negara serta mengancam eksistensi kabinet.<sup>16</sup>

Pertemuan ini seolah-olah menjadi puncak dari pertikaian antara PKI dengan lawan-lawan politiknya di Kota Surabaya sebagai pemanasan menjelang pertarungan yang sesungguhnya pada Pemilihan Umum 1955. Pasca rapat raksasa tersebut PKI Kota Surabaya menemukan kepercayaannya yang amat besar dalam menghadapi pemilihan umum. Lawan-lawan politiknya nyaris tidak melakukan tindakan provokasi lagi terhadap partai ini. Di tingkat nasional PKI juga menemukan kepercayaan dirinya yang teramat besar setelah Jaksa Agung menyetujui usul PKI agar peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang jatuh pada 18 September tidak diperingati secara nasional. Persetujuan Jaksa Agung turun setelah delegasi PKI menghadap dan mengajukan usul tersebut. Persetujuan Jaksa Agung menunjukkan bahwa PKI benar-benar telah menjelma menjadi kekuatan yang sebenarnya (*the real power*) yang siap bertarung pada pemilihan umum. Kritik tajam atas usul PKI tersebut hanya diajukan oleh IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), yang tetap menghendaki agar 18 September tetap diperingati sebagai hari pengkhianatan PKI.<sup>17</sup> IPKI sebagai organisasi yang sebagian besar anggotanya adalah tentara dan veteran merupakan salah satu organisasi yang paling aktif dalam melawan sepak-terjang

<sup>14</sup> "Rapat Raksasa PKI", *Perdamaian*, 31 Mei 1955.

<sup>15</sup> "Tjeramah di Taman Kebudajaan", *Perdamaian*, 31 Mei 1955.

<sup>16</sup> "Rapat Raksasa...", *op.cit.*

<sup>17</sup> "Rakjat Indonesia Harus Tetap Peringati Pengkhianatan PKI", *Java Post*, 10 September 1955.



PKI di Indonesia. Namun karena PKI selalu berlandung dalam ketiak Presiden Sukarno maka lawan-lawan politiknya pun dibuat tidak berdaya. Pada 1950-an dan sesudahnya PKI telah menjadi salah satu sekutu terkuat dari Presiden Sukarno. PKI semakin intim dengan Presiden Sukarno setelah muncul konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin yang menempatkan presiden sebagai kekuatan sentral di Indonesia.<sup>18</sup>

Puncak pertikaian partai-partai politik di Kota Surabaya terjadi pada Pemilihan Umum 1955. Peristiwa tersebut menjadi ajang untuk memperlihatkan keunggulan PKI di kota ini dibandingkan partai-partai lain. Secara formal pemilihan umum menjadi legitimasi paling kuat atas eksistensi PKI di Kota Surabaya. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa PKI unggul di hampir setiap lingkungan jauh meninggalkan para kompetitornya. Pada laporan sementara yang diekspose beberapa surat kabar pada 1 Oktober memperlihatkan bahwa PKI unggul di semua tempat pemungutan suara, sedangkan Masjumi hanya unggul di satu tempat di Surabaya Utara, terutama di basis Muhammadiyah di sekitar kawasan Jalan Mas Mansyur (Lingkungan Ampel).<sup>19</sup> Menurut analisa harian *Perdamaian*, salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangan PKI adalah keberadaan kaum buruh. Sebagai kota industri, keberadaan kaum buruh mendominasi kelompok sosial lain. Mereka inilah yang aktif menjadi penggerak kegiatan-kegiatan partai dan mayoritas dari mereka menjatuhkan pilihannya kepada PKI.<sup>20</sup> Isu-isu yang dikembangkan PKI selalu menarik perhatian kaum buruh, terutama keterlibatannya dalam membela kepentingan mereka ketika berhadapan dengan perusahaan yang merupakan majikan golongan buruh. Salah satu media paling berpengaruh untuk mengorganisir kaum buruh adalah peringatan Hari Buruh yang jatuh tanggal 1 Mei. Peringatan hari buruh di Kota Surabaya selalu diorganisir oleh SOBSI yang merupakan sayap PKI paling berpengaruh di perkotaan.<sup>21</sup> Melalui media peringatan Hari Buruh itulah PKI mengorganisir dan mempengaruhi kaum buruh agar menjadi pendukung setia. Hasil akhir dari

<sup>18</sup> Menurut Harold Crouch Demokrasi Terpimpin ditandai dengan persekutuan politik antara Sukarno dengan PKI serta tingkah laku Sukarno yang melebihi sultan Jawa yang tradisional daripada seorang pemimpin nasional modern. Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), Bab II.

<sup>19</sup> "Dibeberapa tempat kota bandar Surabaya PKI leading", *Perdamaian*, 1 Oktober 1955.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Peran SOBSI mirip dengan peran BTI di pedesaan yang merupakan ujung tombak partai yang berhubungan langsung dengan konstituen berdasarkan profesi.

perhitungan suara di seluruh  
jauh mengungguli partai-partai  
partai politik paling unggul  
sebagaimana ditunjukkan oleh

#### Perolehan Suara

No	Lingkungan
1	Tambaksari
2	Rangkah
3	Jagalan
4	Peneleh
5	Ketabang
6	Pacarkembang
7	Tegalsari
8	Genteng
9	Sawahan
10	Embong Kaliasin
11	Kedungdoro
12	Simo
13	Wonokromo
14	Ngagel
15	Darmo I
16	Darmo II
17	Darmo III
18	Gubeng
19	Bongkaran
20	Pabean Cantian
21	Ampel
22	Nyamplungan
23	Kampung Baru
24	Semampir
25	Ujung
26	Kapasari
27	Srenggahan
28	Simokerto
29	Sidodadi
30	Kapasari
31	Sidokapasari
32	Tembokdukuh
33	Krempangan Utara
34	Krempangan Selatan
35	Tanjung Perak
36	Bubutan
37	Aloon-Aloon Contong

#### Sumber

<sup>22</sup> "Di Surabaya PKI Unggul", *Perdamaian*, 1 Oktober 1955.



perlindungan dalam ketiak Presiden  
 dibuat tidak berdaya. Pada 1950-  
 satu sekutu terkuat dari Presiden  
 Sukarno setelah muncul konsepsi  
 atkan presiden sebagai kekuatan  
 di Kota Surabaya terjadi pada  
 jadi ajang untuk memperlihatkan  
 partai lain. Secara formal pemilihan  
 stensi PKI di Kota Surabaya. Hasil  
 gul di hampir setiap lingkungan  
 aporan sementara yang diekspos  
 perlihatkan bahwa PKI unggul di  
 n Masjumi hanya unggul di satu  
 uhammadiyah di sekitar kawasan  
 menurut analisa harian *Perdamaian*,  
 gan PKI adalah keberadaan kaum  
 n buruh mendominasi kelompok  
 di penggerak kegiatan-kegiatan  
 an pilihannya kepada PKI.<sup>20</sup> Isu-  
 perhatian kaum buruh, terutama  
 n mereka ketika berhadapan  
 n golongan buruh. Salah satu  
 r kaum buruh adalah peringatan  
 an hari buruh di Kota Surabaya  
 sayap PKI paling berpengaruh  
 Buruh itulah PKI mengorganisir  
 pendukung setia. Hasil akhir dari  
 ndai dengan persekutuan politik antara  
 ebihi sultan Jawa yang tradisional dari-  
*Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta:

perhitungan suara di seluruh Lingkungan di kota Surabaya memperlihatkan PKI  
 jauh mengungguli partai-partai lain.<sup>22</sup> Secara rinci perolehan suara untuk empat  
 partai politik paling unggul di masing-masing Lingkungan di Kota Surabaya adalah  
 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Perolehan Suara Pemilu 1955 di Masing-masing Lingkungan  
 di Kota Surabaya

No	Lingkungan	PKI	NU	PNI	Masjumi	PSI
1	Tambaksari	3.878	842	741	159	76
2	Rangkah	4.361	803	1.342	234	41
3	Jagalan	2.347	1.523	910	268	121
4	Peneleh	828	617	100	273	470
5	Ketabang	1.355	463	656	108	90
6	Pacarkembang	3.696	1.211	1.209	356	59
7	Tegalsari	7.292	1.536	1.933	389	151
8	Genteng	2.058	804	1.074	342	124
9	Sawah	3.009	691	1.327	385	239
10	Embong Kaliasin	4.542	1.226	1.283	368	176
11	Kedungdoro	6.173	1.512	1.960	514	115
12	Simo	5.881	905	1.839	281	47
13	Wonokromo	4.451	1.965	509	641	174
14	Ngagel	5.565	2.205	1.103	336	68
15	Darmo I	2.982	444	1.321	251	283
16	Darmo II	3.532	1.224	858	233	69
17	Darmo III	5.857	505	3.051	631	262
18	Gubeng	6.870	1.113	2.360	414	362
19	Bongkaran	298	637	180	100	29
20	Pabean Cantian	148	479	56	63	14
21	Ampel	553	1.607	274	2.102	15
22	Nyemplungan	1.115	3.551	517	1.081	8
23	Kampung Baru	3.534	1.677	755	359	37
24	Semampir	2.415	3.524	692	232	8
25	Ujung	788	433	966	338	55
26	Kapasari	1.984	652	496	119	138
27	Srenggangan	1.317	3.208	394	506	6
28	Simokerto	2.658	940	729	288	101
29	Sidodadi	1.280	1.922	306	389	31
30	Kapasari	2.415	1.305	699	176	122
31	Sidokapasari	2.479	3.223	527	299	47
32	Tembokdukuh	3.879	1.862	1.169	406	50
33	Krempangan Utara	3.534	1.677	755	359	37
34	Krempangan Selatan	2.649	1.223	1.064	340	120
35	Tanjung Perak	2.451	960	590	167	67
36	Bubutan	1.430	1.118	765	279	128
37	Aloon-Aloon Contong	640	980	477	231	168

Sumber: *Perdamaian*, 3 Oktober 1955.

ing", *Perdamaian*, 1 Oktober 1955.

yang merupakan ujung tombak partai  
 n profesi.

<sup>22</sup> "Di Surabaya PKI Unggul", *Perdamaian*, 3 Oktober 1955.



Tabel di atas menjadi bukti kelihaihan PKI dalam mempengaruhi massa di Kota Surabaya. Angka-angka tersebut memperlihatkan kecanggihan PKI dalam berkomunikasi dengan rakyat Kota Surabaya. Jargon partai yang mengedepankan kelompok buruh dan petani terasa pas dengan kondisi rakyat Kota Surabaya yang didominasi kaum buruh. Melalui strategi menjemput bola dengan memperjuangkan kaum buruh ketika berhadapan dengan majikan, telah menyebabkan PKI mendapatkan simpati yang demikian besar. Kondisi ini dimantapkan dengan gerakan progresif partai yang secara simultan terus mengembangkan sayapnya di tingkat akar rumput dengan membangun struktur partai di tingkat ranting dan group. Pengembangan di tingkat akar rumput biasanya disertai dengan pendampingan yang sangat ketat dan terus-menerus.<sup>23</sup> Strategi PKI Kota Surabaya sejalan dengan kebijakan partai di tingkat pusat, yaitu membela kaum proletar dengan patriotisme.<sup>24</sup> Dengan strategi dan garis partai semacam itu maka rakyat merasakan betul kehadiran partai di tengah-tengah mereka. Faktor itulah yang menentukan keberhasilan PKI memenangkan pemilihan umum di Kota Surabaya pada 1955.

### Kaum Proletar sebagai Isu

Kemenangan mutlak PKI pada Pemilihan Umum 1955 untuk Kota Surabaya telah mengukuhkan partai tersebut sebagai "pemilik" kota Surabaya yang sah.<sup>25</sup> Walaupun belum secara mutlak partai ini menguasai kota, karena baik wali kota maupun anggota DPRD belum dikuasai oleh mereka, namun jalan ke arah tersebut sudah terbuka lebar di depan mereka. Strategi yang dijalankan pasca kemenangan dalam pemilihan umum adalah bagaimana agar PKI benar-benar menguasai Kota Surabaya baik pada tingkat akar rumput, kelas menengah, dan elite pemerintahan. Pada tingkat akar rumput, PKI giat melakukan pendampingan terhadap masyarakat kelas bawah yang menjadi korban dari perilaku golongan elite. Salah satu peristiwa penting yang menjadi perhatian PKI Kota Surabaya adalah "Peristiwa Pakis" yang terjadi pada Mei 1956.

Peristiwa Pakis adalah konflik antara aparat pemerintah Kota Besar Surabaya

<sup>23</sup> "OSC PKI Wonokromo akan Mengadakan Tjeramah", *Terompet Masyarakat*, 29 April 1953.

<sup>24</sup> "D.N. Aidit: Politik PKI Sudah Benar", *Terompet Masyarakat*, 16 Mei 1953.

<sup>25</sup> Untuk tingkat Propinsi Jawa Timur selain menang di Kota Surabaya, PKI menang di beberapa kota lain, yaitu di Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Blitar. Lihat Vishal Singh, "The Political Situation in Indonesia", *International Spatator*, 8 November 1958, hlm. 552.

(KBS) dengan para pemukim liar jiwa. Kampung Pakis adalah salah satu kampung yang banyak dihuni oleh para pemukim liar tersebut. Na perintah dari pihak KBS beberapa pemukiman liar tersebut. Na kecil yang telah mereka dirikan. Mereka secara serentak melancarkan aksi mereka terhadap pekerja yang mengatasnamakan massa yang dihadapi terlalu. Tetapi kedatangan beberapa tentara yang semakin kuat. Polisi yang bersenjata sehingga terjadi bentakan. Salah seorang polisi meninggal dunia. Peristiwa Pakis merangsang aparat kepolisian.<sup>26</sup> Di samping aparat kepolisian juga mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut memunculkan aparat pemerintah propinsi dan pemerintah propinsi dan kota-kota itu dan menyalahkan para pemukim liar yang menyebarkan persnya yang mengancam keselamatan yang yang ditandatangani oleh beberapa surat kabar lokal. Peristiwa tersebut adalah hasil dari provokasi dan aksi antara alat negara dengan rakyat, yang dalam hal ini adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) Cabang Surabaya yang mengutuk keras tindakan aparat pemerintah Kota Pakis. PSI menuntut agar aparat pemerintah Kota Pakis

<sup>26</sup> "Pembongkaran Rumah2 Liar"

<sup>27</sup> "Awas Propokasi. Pengumuman"



PKI dalam mempengaruhi massa  
 memperlihatkan kecanggihan PKI  
 Surabaya. Jargon partai yang  
 terasa pas dengan kondisi rakyat  
 Melalui strategi menjemput bola  
 berhadapan dengan majikan,  
 yang demikian besar. Kondisi  
 partai yang secara simultan terus  
 dengan membangun struktur  
 di tingkat akar rumput  
 ketat dan terus-menerus.<sup>23</sup>  
 kebijakan partai di tingkat pusat,  
 me.<sup>24</sup> Dengan strategi dan garis  
 kehadiran partai di tengah-  
 keberhasilan PKI memenangkan

um 1955 untuk Kota Surabaya  
 "milik" kota Surabaya yang sah.<sup>25</sup>  
 menguasai kota, karena baik wali  
 mereka, namun jalan ke arah  
 Strategi yang dijalankan pasca  
 bagaimana agar PKI benar-benar  
 rumput, kelas menengah, dan  
 giat melakukan pendampingan  
 korban dari perilaku golongan  
 perhatian PKI Kota Surabaya  
 56.  
 Pemerintah Kota Besar Surabaya

erompet Masyarakat, 29 April 1953.  
 akat, 16 Mei 1953.  
 ta Surabaya, PKI menang di bebera-  
 n Kota Blitar. Lihat Vishal Singh, "The  
 mber 1958, hlm. 552.

(KBS) dengan para pemukim liar di Kampung Pakis yang sempat memakan korban jiwa. Kampung Pakis adalah salah satu kampung di tepi barat Kota Surabaya yang banyak dihuni oleh para pemukim ilegal (*wild occupation*). Pada 4 Mei 1956 atas perintah dari pihak KBS beberapa orang pekerja bergerak untuk membersihkan pemukiman liar tersebut. Namun para penghuni tidak rela jika gubuk-gubuk kecil yang telah mereka dirikan dan mereka huni dibersihkan oleh pihak KBS. Mereka secara serentak melakukan perlawanan dengan senjata apa saja. Para pekerja yang mengatasnamakan KBS tentu saja kalang kabut karena jumlah massa yang dihadapi terlalu besar. Mereka kemudian minta bantuan polisi. Tetapi kedatangan beberapa truk yang berisi polisi justru memancing solidaritas yang semakin kuat. Polisi yang baru turun dari truk dilawan dengan berbagai senjata sehingga terjadi bentrokan yang amat kacau. Dalam kondisi terjepit salah seorang polisi mengeluarkan tembakan peringatan, namun tembakan tersebut ternyata mengenai seorang penjual sate dan seorang anak kecil. Dua orang tersebut akhirnya tewas. Kondisi semakin tidak terkendali karena massa terus melakukan perlawanan yang mengakibatkan dua orang polisi meninggal dunia. Peristiwa Pakis merenggut empat orang korban yaitu penduduk dan aparat kepolisian.<sup>26</sup> Di samping korban tewas, beberapa penduduk dan aparat kepolisian juga mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut memancing reaksi yang amat beragam baik dari pihak aparat pemerintah propinsi dan kota, partai politik, serta masyarakat luas. Pihak pemerintah propinsi dan kota tentu saja membela aparatnya yang bertugas saat itu dan menyalahkan para penyerang yang merupakan para pemukim liar. Dalam siaran persnya yang mengatasnamakan KKD (Koordinasi Keamanan Daerah) yang yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Samadikoen dan dimuat di beberapa surat kabar lokal pada 7 Mei disebutkan bahwa Peristiwa Pakis adalah hasil dari provokasi dari pihak-pihak tertentu yang akan mengadu domba antara alat negara dengan rakyat.<sup>27</sup> Partai-partai politik sebagai representasi dari rakyat, yang dalam hal ini adalah korban, tentu saja bersuara sebaliknya. Partai Sosialis Indonesia (PSI) Cabang Surabaya Utara, Tengah, dan Selatan misalnya mengutuk keras tindakan aparat pemerintah yang memicu terjadinya Peristiwa Pakis. PSI menuntut agar aparat harus mengembalikan dan mempertahankan

<sup>26</sup> "Pembongkaran Rumah2 Liar Membawa Korban", *Soerabaja Post*, 7 Mei 1956.

<sup>27</sup> "Awas Propokasi. Pengumuman KKD Djawa Timur", *Soerabaja Post*, 7 Mei 1956.



gezag (kewajiban) alat-alat pemerintah yang berjiwa kerakyatan dan mampu melindungi rakyat secara menyeluruh. PSI juga mendesak kepada pemerintah agar segera merumuskan Undang-Undang Agraria yang progresif sebagai salah satu cara untuk memecahkan persoalan okupasi lahan secara liar dan tidak sah. Secara tegas PSI menyerukan agar pemerintah menghentikan pembongkaran pemukiman liar dengan cara-cara brutal.<sup>28</sup>

PKI yang memiliki basis massa akar rumput paling banyak di Kota Surabaya memiliki kewajiban moral paling besar dalam menyikapi Peristiwa Pakis karena obyek dari peristiwa itu, yaitu penggusuran rakyat kecil pemukim liar, adalah rakyat jelata. Dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada 13 Mei 1956, Komite Seksi PKI Kota Surabaya menyerukan agar pembongkaran rumah rakyat yang didirikan tanpa izin dan tanpa hak harus segera dihentikan. Hal ini penting agar hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal bisa terlindungi. Menurut PKI pembongkaran tersebut sangat merugikan rakyat kecil.<sup>29</sup> Suara paling keras dalam menyikapi Peristiwa Pakis datang dari SOBSI, yaitu gabungan organisasi buruh yang merupakan sayap PKI paling berpengaruh di kota Surabaya. Secara tegas SOBSI mengingatkan kembali kepada pemerintah Kota Besar Surabaya (KBS) bahwa Peristiwa Pakis tidak mungkin terjadi seandainya pemerintah kota mau memperhatikan Resolusi Rapat Raksasa 1 Mei 1956 yang salah satunya berbunyi agar pemerintah kota mau mengesahkan tanah-tanah dan rumah-rumah liar yang telah dihuni oleh rakyat.<sup>30</sup> Berkaitan dengan jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut SOBSI menuntut agar siapapun yang bersalah dan menyebabkan melayangnya nyawa rakyat harus dihukum dengan setimpal. SOBSI juga menuntut kepada pemerintah agar tanah-tanah yang telah ditempati oleh rakyat secara liar disahkan menjadi hak milik rakyat. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi kaum buruh SOBSI meminta kepada pemerintah agar mau menekan perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Surabaya terutama perusahaan Belanda agar membangun perumahan untuk

<sup>28</sup> "Hentikan Tjara2 Pembongkaran Bangunan Liar", *Soerabaja Post*, 8 Mei 1956.

<sup>29</sup> "Penggelapan dan pentjurian-Djuga PKI lawan Pakis-Affaire-Idham lewat S,baja. Djuru terbang depan pengadilan-TNH-TRIP", *Soerabaja Post*, 14 Mei 1956.

<sup>30</sup> Pada 1 Mei 1956 di Kota Surabaya diadakan rapat raksasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Rapat raksasa merupakan tradisi kaum buruh di Kota Surabaya dalam rangka memperingati hari besar bagi mereka tersebut. Kegiatan ini secara rutin digelar oleh SOBSI dan dihadiri oleh para buruh dari seluruh kota. "Satu Sikap, SOBSI menuntut hukuman bagi alat2 negara", *Soerabaja Post*, 16 Mei 1956.

para buruhnya.<sup>31</sup>

PKI beserta *underbo*  
Peristiwa Pakis menjadi ka  
penciptaan opini tentang  
media yang efektif untuk m  
selanjutnya dari PKI untu  
Berbagai strategi dilakuka  
DPRDS Kota Besar Surab  
PKI dengan lantang meny  
rencana pembongkaran r  
pemerintah sanggup mer  
sah. Mereka juga mendesa  
hidup kepada keluarga ya  
korban Peristiwa Pakis.<sup>33</sup>

Strategi PKI mempol  
partai tersebut. Opini yan  
merupakan partai yang p  
kaum proletar.<sup>34</sup> Dampak  
umum lokal dalam rangk  
(dan diulang pada Februa  
berhasil diraih oleh partai

### Sebagai Penguasa Kota S

Kemampuan PKI dalam

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Setelah berhasil meraih  
PKI secara serius menggarap ko  
Pemilihan Umum 1955 adalah n  
kan pada 29 Juli 1957 serta mer  
11 Juni 1958. "Usaha PKI: Wali  
telah siapkan Calon2 Wali kota-r  
lak di Surabaya?" *Soerabaja Post*

<sup>33</sup> "Dewan Kota dan Peristi

<sup>34</sup> Beberapa partai politik  
nya dalam menyikapi Peristiwa  
keamanan dalam menindak par  
Masjumi dan NU kota Surabaya.

<sup>35</sup> "17 Kursi DPRD Surabaya



erjiwa kerakyatan dan mampu mendesak kepada pemerintah ria yang progresif sebagai salah lahan secara liar dan tidak sah. menghentikan pembongkaran paling banyak di Kota Surabaya menyikapi Peristiwa Pakis karena yat kecil pemukim liar, adalah kan pada 13 Mei 1956, Comite bongkaran rumah rakyat yang ra dihentikan. Hal ini penting gal bisa terlindungi. Menurut kyat kecil.<sup>29</sup> Suara paling keras SI, yaitu gabungan organisasi aruh di kota Surabaya. Secara erintah Kota Besar Surabaya i seandainya pemerintah kota Mei 1956 yang salah satunya an tanah-tanah dan rumah- itan dengan jatuhnya korban siapapun yang bersalah dan dihukum dengan setimpal. h-tanah yang telah ditempati rakyat. Sebagai upaya untuk ruh SOBSI meminta kepada sahan yang berada di Kota mbangun perumahan untuk

*Soerabaja Post*, 8 Mei 1956.

aire-Idham lewat S,baja. Djuru ter-

a dalam rangka memperingati Hari ruh di Kota Surabaya dalam rangka ara rutin digelar oleh SOBSI dan di- untut hukuman bagi alat2 negara",

para buruhnya.<sup>31</sup>

PKI beserta *underbouw*-nya di Kota Surabaya secara *all out* mendorong Peristiwa Pakis menjadi kasus yang besar dan menasional. Mereka sadar bahwa penciptaan opini tentang pembelaan kaum proletar akan menjadi salah satu media yang efektif untuk meningkatkan citra partai. Hal ini terkait dengan rencana selanjutnya dari PKI untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai kota komunis.<sup>32</sup> Berbagai strategi dilakukan untuk me-nasional-kan Peristiwa Pakis. Pada sidang DPRDS Kota Besar Surabaya pada 21 Mei 1956 anggota dewan dari unsur PKI dengan lantang mengajukan usul kepada pemerintah agar membatalkan rencana pembongkaran rumah-rumah yang telah dihuni oleh rakyat sebelum pemerintah sanggup menyediakan penampungan atau perumahan lain yang sah. Mereka juga mendesak pemerintah supaya memberi ganti rugi dan jaminan hidup kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah menjadi korban Peristiwa Pakis.<sup>33</sup>

Strategi PKI mempolitisir Peristiwa Pakis membawa dampak positif bagi partai tersebut. Opini yang berkembang pasca peristiwa itu adalah bahwa PKI merupakan partai yang peduli dengan penderitaan rakyat kelas bawah atau kaum proletar.<sup>34</sup> Dampak positif tersebut terbukti ketika diadakan pemilihan umum lokal dalam rangka memilih anggota DPRD Kota Surabaya pada 1957 (dan diulang pada Februari 1958) PKI menang secara mutlak. Jumlah kursi yang berhasil diraih oleh partai ini adalah 17 dari 35 kursi yang diperebutkan.<sup>35</sup>

### Sebagai Penguasa Kota Surabaya

Kemampuan PKI dalam mengemas berbagai isu perkotaan yang menyangkut

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Setelah berhasil meraih suara terbanyak untuk Kota Surabaya pada Pemilihan Umum 1955 PKI secara serius menggarap kota ini menjadi "kota merah". Salah satu target paling dekat setelah Pemilihan Umum 1955 adalah memenangkan pemilihan anggota DPRD Kota Surabaya yang diadakan pada 29 Juli 1957 serta memenangkan pemilihan Wali Kota Surabaya yang dilaksanakan pada 11 Juni 1958. "Usaha PKI: Wali kota Komunis untuk Surabaya!" *Soerabaja Post*, 19 Juli 1957. "PKI telah siapkan Calon2 Wali kota-nja untuk Kota2 Besar!" *Soerabaja Post*, 10 Agustus 1957. "PKI mutlak di Surabaya?" *Soerabaja Post*, 10 Agustus 1957.

<sup>33</sup> "Dewan Kota dan Peristiwa Pakis", *Soerabaja Post*, 22 Mei 1956.

<sup>34</sup> Beberapa partai politik di Kota Surabaya memiliki sikap yang berbeda satu dengan lainnya dalam menyikapi Peristiwa Pakis. PSII Kota Surabaya misalnya membenarkan tindakan aparat keamanan dalam menindak para penghuni pemukim liar. Pendapat yang sama dilontarkan oleh Masjumi dan NU kota Surabaya. "Peristiwa Pakis", *Soerabaja Post*, 19 Juni 1956.

<sup>35</sup> "17 Kursi DPRD Surabaya Diborong PKI", *Pewarta Soerabaia*, 26 Maret 1958.



hajat hidup rakyat kelas bawah di Kota Surabaya telah membuahkan simpati yang luar biasa terhadap partai ini. Maka tidak mengherankan jika ranting-ranting PKI terbentuk di kampung-kampung, organisasi buruh yang bernaung di bawah SOBSI semakin banyak. Berbagai pertemuan partai, rapat-rapat raksasa, pendampingan terhadap konstituen, pendampingan terhadap buruh, kunjungan dari politbiro dan lain sebagainya terus-menerus dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai salah satu basis terkuat PKI di perkotaan.

Setelah menang mutlak dalam Pemilihan Umum 1955 untuk wilayah Kota Surabaya, langkah PKI selanjutnya adalah menyusun strategi untuk menguasai kota ini secara politis. Untuk menguasai Kota Surabaya paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan yaitu menguasai mayoritas anggota DPRD dan menjadikan kadernya sebagai wali kota. Berbeda dengan Pemilihan Umum 1971 dan sesudahnya, yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum 1955 hanya memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Oleh karena itu untuk memilih anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota harus diselenggarakan pemilihan umum lokal di daerah yang bersangkutan.

Tahun 1957 keanggotaan DPRD Kota Besar Surabaya periode tahun itu berakhir. Itu artinya pada tahun itu pula akan dilangsungkan pemilihan umum (lokal) untuk memilih anggota DPRD Kota Besar Surabaya. Bukan pekerjaan sulit bagi PKI untuk memenangkan pemilihan anggota DPRD karena pada tahun ini sudah sedemikian kuat di Kota Surabaya. Ranting-ranting sudah tersebar di hampir seluruh lingkungan, cabang-cabang SOBSI beserta organisasi anggotanya juga hampir pasti ada di setiap perusahaan. Namun demikian tetap saja PKI melakukan langkah-langkah persiapan untuk menyongsong pemilihan umum lokal. Pemilihan Umum Lokal 1957 menjadi amat strategis karena pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1958 jabatan Wali Kota Surabaya akan berakhir. Karena pada waktu itu wali kota dipilih melalui sidang DPRD maka komposisi anggota DPRD sangat menentukan siapa dan dari partai mana yang berhak menjadi wali kota. Jika suatu partai berhasil menguasai DPRD maka hampir pasti kadernya akan lolos menjadi wali kota. PKI sangat berkepentingan untuk memperjuangkan kadernya menjadi Wali Kota Surabaya.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> "Usaha PKI: Wali kota Komunis untuk Surabaya!" *Soerabaja Post*, 19 Juli 1957. "PKI telah siapkan Calon2 Wali kota-nja untuk Kota2 Besar!" *Soerabaja Post*, 10 Agustus 1957.

Tekad PKI untuk mengkonsolidasi partai yang sanjaya kampanye yang disediakan sebaik-baiknya. Tanggal 21 Desember enam tempat secara serentak Gedung Ludruk Pandegiling, Gedung Ludruk Jalan Seng, dan menjadi bukti betapa lincah tingkat praktis PKI banyak merproletar dan kelompok miskin strategi yang dimainkan dalam isu nasional sebagai bahan contoh misalnya, pada kampanye pada 21 Oktober para pleno Comite Central (CC) PKI revolusi 1945.<sup>38</sup>

Pada kampanye di tempo Desember, juru kampanye PKI lebih banyak mengecam lawan yang anggota Politbiro PKI dengan menggalang kekuatan dan ber-Symbolon yang melakukan per yang dilakukan oleh Symbolo mempertahankan kekayaan dan mengecam dengan pedas Ma kecaman keras karena diangg dengan kondisi sekarang. Ke pemberontakan PRRI yang se PSI, serta secara diam-diam PKI juga menolak keras usaha Penolakan terhadap Hatta me

<sup>37</sup> "PKI KBS Mulai Kampanje der"

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> "PKI Surabaya Mengetjam Perdamaian, 31 Desember 1956.



SIGN  
HERE  
Tanda Tangan

baya telah membuah simpati  
tidak mengherankan jika ranting-  
organisasi buruh yang bernaung di  
muan partai, rapat-rapat raksasa,  
pimpinan terhadap buruh, kunjungan  
perus dilakukan. Hal ini dilakukan  
a sebagai salah satu basis terkuat  
Umum 1955 untuk wilayah Kota  
nyusun strategi untuk menguasai  
Surabaya paling tidak ada dua hal  
s anggota DPRD dan menjadikan  
n Pemilihan Umum 1971 dan  
nggota DPR, DPRD Propinsi, dan  
hanya memilih anggota DPR dan  
memilih anggota DPRD Propinsi  
emilihan umum lokal di daerah  
ar Surabaya periode tahun itu  
dilaksanakan pemilihan umum  
Surabaya. Bukan pekerjaan sulit  
ta DPRD karena pada tahun ini  
ting-ranting sudah tersebar di  
si beserta organisasi anggotanya  
amun demikian tetap saja PKI  
enyongsong pemilihan umum  
at strategis karena pada tahun  
Surabaya akan berakhir. Karena  
DPRD maka komposisi anggota  
hanya yang berhak menjadi wali  
D maka hampir pasti kadernya  
tingan untuk memperjuangkan

Tekad PKI untuk menguasai Kota Surabaya diwujudkan dalam bentuk konsolidasi partai yang sangat solid. Partai ini menggunakan waktu untuk kampanye yang disediakan oleh "Panitya Pemilihan Daerah (PPD)" dengan sebaik-baiknya. Tanggal 21 Oktober 1956 PKI mulai kampanye perdananya di enam tempat secara serentak, yaitu di Gedung Ludruk Aliran Masa Wonokromo, Gedung Ludruk Pandegiling, Gedung RSO Kapas Krampung, Gedung GNI Bubutan, Gedung Ludruk Jalan Seng, dan di Gedung Sing Khie Hwee.<sup>37</sup> Musim kampanye menjadi bukti betapa lincahnya PKI dalam memainkan taktik dan strategi. Pada tingkat praktis PKI banyak memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kaum proletar dan kelompok miskin lainnya, seperti pada bagi Peristiwa Pakis. Lain lagi strategi yang dimainkan dalam kampanye, PKI justru lebih banyak mengolah isu-isu nasional sebagai bahan ceramah di panggung-panggung kampanye. Sebagai contoh misalnya, pada kampanye yang dilaksanakan serentak di enam tempat pada 21 Oktober para pembicara lebih banyak menjelaskan hasil-hasil sidang pleno Komite Central (CC) PKI ke-4 yang intinya adalah tuntutan menyelesaikan revolusi 1945.<sup>38</sup>

Pada kampanye di tempat lain, yaitu di lapangan PRS Surabaya pada 30 Desember, juru kampanye PKI yang didatangkan dari Jakarta yaitu Soedisman lebih banyak mengecam lawan-lawan politiknya di tingkat nasional. Soedisman yang anggota Politbiro PKI dengan berapi-api mengemukakan bahwa PKI akan menggalang kekuatan dan berusaha membasmi komplotan Kolonel Lubis dan Simbolon yang melakukan pemberontakan di Sumatera (PRRI). Menurutnya apa yang dilakukan oleh Simbolon adalah gerakan sparatis yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan daerahnya dan untuk keuntungan sendiri. Ia juga mengecam dengan pedas Masjumi, PSI, dan Bung Hatta. Masjumi mendapat kecaman keras karena dianggap "berpolitik lari" dan tidak bertanggung jawab dengan kondisi sekarang. Kecaman tersebut berkaitan dengan meletusnya pemberontakan PRRI yang secara politis mendapat dukungan dari Masjumi dan PSI, serta secara diam-diam menurut PKI, didukung pula oleh Amerika Serikat. PKI juga menolak keras usaha Bung Hatta untuk kembali mengendalikan negara.<sup>39</sup> Penolakan terhadap Hatta menjadi resolusi resmi dari kampanye tersebut yang

<sup>37</sup> "PKI KBS Mulai Kampanje dengan Tjeramah", *Perdamaian*, 25 Oktober 1956.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> "PKI Surabaya Mengetjam Pedas Lawan2 Politiknja, Menolak Drs. Hatta Kuasa Kembali", *Perdamaian*, 31 Desember 1956.

*Surabaya Post*, 19 Juli 1957. "PKI telah  
*Post*, 10 Agustus 1957.



dibacakan oleh Ruslan Kamaludin dari Propinsi Komite PKI Jawa Timur.<sup>40</sup>

Selain aktif melakukan kampanye di berbagai tempat, PKI Kota Surabaya juga aktif melakukan penggalangan dana dalam rangka menghadapi pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD. Berbagai momen yang berkaitan dengan kegiatan partai biasanya diselengi dengan acara penggalangan dana secara besar-besaran. Pada peringatan ulang tahun PKI yang ke-37 di Kota Surabaya partai ini membentuk "Gerakan Keuangan Pemilihan DPRD" yang dimulai sejak 17 Mei 1957 sampai 14 Juni 1957. Kantor-kantor PKI di seluruh kota dibuka untuk menerima sumbangan dari rakyat.<sup>41</sup> PKI memang sangat optimis bahwa Kota Surabaya akan segera menjadi miliknya. Bahkan secara nasional PKI menargetkan akan segera pula bisa menguasai Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Ruslan Kamaludin pada malam peringatan ulang tahun PKI ke-37 yang secara meriah diselenggarakan di Gedung Pekan Raya Surabaya.

Ruslan Kamaludin dalam sambutannya yang berlangsung selama hampir dua jam selain berusaha hendak meyakinkan anggotanya terhadap ideologi PKI, juga mengutarakan kejakinannya, bahwa suatu saat dimana keadaan memungkinkan tentu kaum proletar yang disokong oleh kaum buruh dan tani akan memegang kekuasaan di Indonesia dengan tidak membutuhkan bantuan dari kaum "bordjuasi", yang hakekatnya akan menjadi kaum kapitalis.<sup>42</sup>

Menurut Ruslan usaha penggalangan dana dari rakyat disamping untuk mendukung usaha PKI dalam rangka memenangkan pemilihan anggota DPRD Kota Surabaya juga dimaksudkan untuk menangkal berbagai tuduhan bahwa selama ini PKI mendapat bantuan dana dari Uni Soviet dan dari RRC. Menurutnya PKI lebih suka meminta bantuan uang dari rakyat untuk membiayai perjuangannya dari pada meng-korup uang negara atau uang rakyat.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.* Isu-isu nasional menjadi tema utama pada kampanye-kampanye selanjutnya. Pada kampanye yang dilakukan oleh PKI di Lingkungan Rangkah pada Januari 1957 telah memutuskan dan melahirkan resolusi yang antara lain berisi: Mendukung tindakan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera, Agar kabinet bisa berjalan terus tanpa melibatkan Masjumi serta melaksanakan program yang menguntungkan rakyat terutama kaum buruh dan tani, mencegah kembalinya Bung Hatta ke pemerintahan, dan mengajak seluruh rakyat dan partai-partai agar menggalang persatuan serta mempertajam kewaspadaan. "Rapat Umum PKI Lingkungan Rangkah", *Pewarta Soerabaia*, 25 Januari 1957.

<sup>41</sup> "Ulang Tahun ke-37 PKI Diperingati dengan Gerakan Pengumpulan Uang", *Soeara Rakjat*, 23 Mei 1957.

<sup>42</sup> "PKI 37 Tahun", *Soeara Rakjat*, 24 Mei 1957.

<sup>43</sup> *Ibid.*



Ruslan Kamaludin, Propinsi Komite Tahun PKI ke-37 di Gedung Pekan Raya Surabaya.

Optimisme PKI dalam menghadapi pemilihan umum dengan banyaknya jumlah nama calon yang diajukan kepada partai politik, organisasi massa dan umum untuk memilih anggota DPRD Kota Surabaya paling banyak. Hal itu dilakukan untuk meraih suara terbanyak di kota tersebut. Kerja keras yang telah dilakukan PKI untuk meraih anggota DPRD akan jauh lebih terlihat pada pemilihan umum.

Optimisme PKI Kota Surabaya terlihat pada 26 Juli 1957 dan hasilnya menunjukkan kemenangan dengan meraih 155.000 suara, NU meraih 64.000 suara, dan PKI meraih 100.000 suara. Menuai protes dari berbagai partai politik.

<sup>44</sup> Dalam daftar nama calon anggota DPRD Kota Surabaya yang diajukan oleh PKI dan NU, banyak pun calon yang diajukan berasal dari partai-partai lain. "Partai2 jg ikut pemilihan DPRD Kota Surabaya", *Soeara Rakjat*, 26 Juli 1957.

<sup>45</sup> Hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum 1957. NU meraih 64.000 suara, PKI meraih 100.000 suara, dan PKI meraih 155.000 suara. "Surat Suara2 Djangan Dibuat", *Soerabaja Post*, 10 Agustus 1957.





Ruslan Kamaludin, Propinsi Komite PKI Jawa Timur, sedang memberikan sambutannya pada Ulang Tahun PKI ke-37 di Gedung Pekan Raya Surabaya (Sumber: *Soeara Rakjat*, 24 Mei 1957).

Optimisme PKI dalam menghadapi pemilihan anggota DPRD ditunjukkan dengan banyaknya jumlah nama calon anggota DPRD Kota Surabaya dari partai tersebut yang diajukan kepada "Panitya Pemilihan Daerah (PPD)". Jika PNI hanya mengajukan 33 nama calon, NU mengajukan 24 nama calon, dan Masjumi 17 nama calon, maka PKI dengan kepercayaan diri yang luar biasa mengajukan 48 nama calon. Jika digabungkan dengan calon yang diajukan oleh Baperki maka jumlah calon yang diajukan oleh PKI menjadi 54 nama calon.<sup>44</sup> Dari seluruh partai politik, organisasi massa, atau perorangan yang mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD Kota Surabaya, PKI menyodorkan calon paling banyak. Hal itu dilakukan karena pada Pemilihan Umum 1955 PKI berhasil meraih suara terbanyak di kota ini sehingga PKI sangat optimis bahwa dengan kerja keras yang telah dilakukan jumlah suara yang akan diraih dalam pemilihan anggota DPRD akan jauh lebih besar.

Optimisme PKI Kota Surabaya terbukti benar. Pemilihan umum yang digelar pada 26 Juli 1957 dan hasilnya dihitung 29 Juli telah mengukuhkan PKI sebagai pemenangnya dengan meraih 155.000 suara.<sup>45</sup> Hasil pemilihan tersebut ternyata menuai protes dari berbagai pihak karena prosesnya dianggap tidak benar dan

<sup>44</sup> Dalam daftar nama calon anggota DPRD yang dilansir oleh harian *Soeara Rakjat* disebutkan bahwa pengajuan calon dari PKI dan Baperki dilakukan secara bersama-sama (digabung) walaupun calon yang diajukan berasal dari organisasi yang berbeda dan dilakukan secara sendiri-sendiri. "Partai2 jg ikut pemilihan DPRD Kotapradja Surabaya", *Soeara Rakjat*, 15 Juni 1957.

<sup>45</sup> Hasil pemungutan suara yang dilaksanakan 29 Juli 1957 adalah sebagai berikut: PKI meraih 155.000 suara, NU meraih 64.000 suara, PNI meraih 36.000 suara, dan Masjumi meraih 15.000 suara. "Surat Suara2 Djangan Dibuka", *Soerabaja Post*, 27 Juli 1957. "PKI Mutlak di Surabaya", *Soerabaja Post*, 10 Agustus 1957.



banyak kecurangan. Kecurangan tersebut antara lain banyak masyarakat yang tidak mendapat surat undangan, surat undangan dobel, panitia tidak menyuruh masyarakat yang telah memilih untuk cap jempol atau tanda tangan sehingga mereka bisa memilih beberapa kali, adanya intimidasi, dan lain sebagainya. Setelah mendapat protes dari sana-sini akhirnya diputuskan bahwa pemilihan akan diulang. Pelanggaran paling mencolok adalah ketidaknetralan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) sebagai penyelenggara pemilihan. PPD ternyata memihak kepada PKI sehingga banyak melakukan pemaksaan kepada rakyat untuk memilih partai tersebut. Iming-iming yang diberikan kepada pemilih adalah karena PKI telah banyak menolong orang kecil. Kecurangan juga masih terjadi pada pemilihan ulangan yang dilakukan tanggal 25 Februari 1958.<sup>46</sup> Pemilihan ulang tetap mengukuhkan PKI sebagai pemenangnya dengan meraih suara 150.457 suara. Adapun perolehan partai dan organisasi lain adalah sebagai berikut: NU meraih 66.349 suara, PNI meraih 38.023 suara, Masjumi mendapat 15.100 suara, dan Baperki mendapat 8.957 suara. Dengan komposisi suara seperti itu, setelah dibagi dengan builangan pembagi dan pembagian sisa suara akhirnya diperoleh komposisi anggota DPRD kota Surabaya sebagai berikut: PKI memperoleh 17 kursi, NU memperoleh 8 kursi, PNI memperoleh 4 kursi, Masjumi 2 kursi, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), Baperki, Parkindo, dan Partai Katolik masing-masing mendapat satu kursi.<sup>47</sup>

### Memilih Wali Kota Surabaya

Keberhasilan PKI Kota Surabaya meraih 17 kursi DPRD telah mengukuhkan partai ini menjadi "pemilik" Kota Surabaya. Harapan agar Kota Surabaya dipimpin oleh wali kota dari PKI juga tinggal satu langkah lagi. Dalam pelantikan anggota DPRD dan sekaligus pemilihan ketua yang dilaksanakan pada 20 Mei 1958, Sudarmadji dari PKI dipilih secara aklamasi sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Adapun Wakil Ketua I adalah Hirman Kusumowardojo (PNI) dan Wakil

<sup>46</sup> "Ulangan Pemungutan Suara Masih Diliputi Kepintjangan", *Pewarta Soerabaia*, 26 Februari 1958.

<sup>47</sup> "17 Kursi DPRD Surabaya Diborong PKI", *Pewarta Soerabaia*, 26 Maret 1958. "Masjumi mendapat 2 kursi, PNI 4, NU 8 dan PKI 17", *Soeara Rakjat*, 26 Maret 1958. Dinamika politik Kota Surabaya pada waktu itu cukup unik. Untuk menjembatani keanggotaan DPRD lama yang telah berakhir dengan DPRD baru yang belum dilantik maka dibentuk DPRD Peralihan yang beranggotakan 25 orang. Komposisi anggota DPRD Peralihan kota Surabaya tahun 1958 adalah sebagai berikut: PKI 11 orang, NU 5 orang, PNI 4 orang, Masjumi, Baperki, Parkindo, Katolik, dan PRI masing-masing satu orang. *Pewarta Soerabaia*, 26 Maret 1958.

Ketua II R. Damanhuri (NU).<sup>48</sup> Satrio sebagai pemegang kendali mencalonkan Dr. Satrio sebagai kepala daerah pada waktu itu belite. Percepatan pencalonan wali kota saat itu yang dipegang Pemilihan wali kota menjadi baru saja dilantik. Pencalonan suara di DPRD membuat partai wali kota. Dalam hitung-hitung menghadapi PKI di DPRD, apa dari partai lain.<sup>49</sup>

Satrio dicalonkan menjadi PKI yang cakap dan paling m *Indie Artsen School/Sekolah De* kemerdekaan pernah menjadi Sjarifuddin. Pada saat dicalonkan diperbantukan pada Djawatan RSUP Karangmenjangan dan se penyakit syaraf di Fakultas Kedokteran Proses pencalonan Satrio ekspresif dinamika politik di mayoritas anggota dewan tetap partai lain. Partai yang paling m

<sup>48</sup> Anggota DPRD dari PKI yang Amirudin, Moh. Djais, Ny. Suwarno N Sien, Sutojo Rahardjo, Askandar, Ny. Su "Pelantikan DPRD Kotapradja S'bjaja", S sebagai Ketua DPR-D", *Djawa Post*, 21 Mei

<sup>49</sup> Dalam hitung-hitungan PKI part Baperki, Katolik, dan Parkindo. Jika duk sedangkan partai lain yang tidak men 15 suara. "Dr. Satrio (tjalon PKI): Suka Setudju", *Soerabaja Post*, 4 Juni 1958.

<sup>50</sup> *Ibid.* Dalam organisasi politik bahkan pernah menjadi ketua cabang o itu ia menjadi anggota Partai Buruh Indo lai 1953 Satrio secara resmi pindah mer Daerah Kotapraja Surabaya, Tjalon Tung



SIG  
HER  
Tanda Tangan

URSAM

lain banyak masyarakat yang  
dobel, panitia tidak menyuruh  
ol atau tanda tangan sehingga  
timidasi, dan lain sebagainya.  
diputuskan bahwa pemilihan  
adalah ketidaknetralan Panitia  
pemilihan. PPD ternyata  
pemaksaan kepada rakyat  
ng diberikan kepada pemilih  
kecil. Kecurangan juga masih  
tanggal 25 Februari 1958.<sup>46</sup>  
pemenangnya dengan meraih  
organisasi lain adalah sebagai  
23 suara, Masjumi mendapat  
ara. Dengan komposisi suara  
agi dan pembagian sisa suara  
ta Surabaya sebagai berikut:  
rsi, PNI memperoleh 4 kursi,  
lik Indonesia (P3RI), Baperki,  
apat satu kursi.<sup>47</sup>

n", *Pewarta Soerabaia*, 26 Februari

raiba, 26 Maret 1958. "Masjumi  
Maret 1958. Dinamika politik Kota  
anggotaan DPRD lama yang telah  
PRD Peralihan yang beranggotakan  
in 1958 adalah sebagai berikut: PKI  
o, Katolik, dan PRI masing-masing

Ketua II R. Damanhuri (NU).<sup>48</sup> Selang sepuluh hari setelah anggota DPRD dilantik, PKI sebagai pemegang kendali lembaga tersebut segera bergerak cepat dengan mencalonkan Dr. Satrio sebagai calon Wali Kota Surabaya. Tata cara pencalonan kepala daerah pada waktu itu memang masih sangat simpel dan tidak terbelit-belit. Percepatan pencalonan Wali Kota Surabaya disebabkan karena jabatan wali kota saat itu yang dipegang oleh Istidjab Tjokrokusumo segera berakhir.

Pemilihan wali kota menjadi agenda pertama dari DPRD Kota Surabaya yang baru saja dilantik. Pencalonan Dr. Satrio oleh PKI yang menguasai mayoritas suara di DPRD membuat partai lain tidak mencalonkan kadernya sebagai calon wali kota. Dalam hitung-hitungan angka sudah pasti partai lain akan kalah menghadapi PKI di DPRD, apalagi pencalonan Satrio juga mendapat dukungan dari partai lain.<sup>49</sup>

Satrio dicalonkan menjadi Wali Kota Surabaya karena merupakan kader PKI yang cakap dan paling menonjol. Ia adalah lulusan NIAS (*Nederlandsch Indie Artsen School*/Sekolah Dokter Hindia Belanda) Surabaya 1942. Pada awal kemerdekaan pernah menjadi Menteri Muda Kesehatan pada Kabinet Amir Sjarifuddin. Pada saat dicalonkan, Satrio adalah pegawai Kotapraja Surabaya yang diperbantukan pada Djawatan Kesehatan Kota (DKK) sekaligus sebagai dokter di RSUP Karangmenjangan dan sebagai asisten dari Prof. Dr. Sujunus dalam bidang penyakit syaraf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.<sup>50</sup>

Proses pencalonan Satrio menjadi wali kota menjadi gambaran paling ekspresif dinamika politik di Kota Surabaya. Walaupun ia dicalonkan oleh mayoritas anggota dewan tetapi bukan berarti tidak mendapat perlawanan dari partai lain. Partai yang paling menentang calon dari PKI tersebut adalah NU dan

<sup>48</sup> Anggota DPRD dari PKI yang dilantik antara lain: Bardi Harsono, Suroso, Sudarmadji, Amirudin, Moh. Djais, Ny. Suwarno Napsijah, Matrawi, Sujono, Prasetyo Moh. Sarkawi, Ong Ing Sien, Sutojo Rahardjo, Askandar, Ny. Sutomo Kalifah, Matai, Ukir Marsono, Hadisumarto, Mudjiato. "Pelantikan DPRD Kotapradja S'abaja", *Soerabaja Post*, 21 Mei 1958. "Sudarmadji (PKI) terpilih sebagai Ketua DPR-D", *Djawa Post*, 21 Mei 1958.

<sup>49</sup> Dalam hitung-hitungan PKI partai lain yang akan mendukung pencalonan Satrio antara lain Baperki, Katolik, dan Parkindo. Jika dukungan itu bulat maka Satrio mendapat dukungan 20 suara, sedangkan partai lain yang tidak mendukung yaitu NU, PNI, Masjumi, dan P3RI hanya memiliki 15 suara. "Dr. Satrio (tjalon PKI): Suka Mendjadi Kepala Daerah Kota Surabaya Asal Semua Partai Setudju", *Soerabaja Post*, 4 Juni 1958.

<sup>50</sup> *Ibid.* Dalam organisasi politik pada awalnya adalah anggota Barisan Burush Indonesia, bahkan pernah menjadi ketua cabang organisasi ini ketika menjalankan tugas di Situbondo. Setelah itu ia menjadi anggota Partai Buruh Indonesia, tetapi pada 1950 partai tersebut bubar sehingga mulai 1953 Satrio secara resmi pindah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. "Dr. Satrio Kepala Daerah Kotapraja Surabaya, Tjalon Tunggal Terpilih Setjara Aklamasi", *Java Post*, 12 Juni 1958.



Masjumi, dua partai politik yang merupakan lawan PKI paling kuat baik di tingkat nasional maupun di Kota Surabaya. Walaupun secara ideologis dengan calon yang diajukan oleh PKI, namun NU dan Masjumi tidak kuasa melawan dengan cara mengajukan calon sendiri. Mereka sadar bahwa keanggotaan mereka di DPRD secara kuantitas minoritas. Walaupun misalnya NU dan Masjumi mencalonkan calon sendiri sudah pasti mereka akan kalah ketika dilakukan pemilihan di DPRD karena pemilihan wali kota tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat tetapi oleh anggota DPRD. Peluang NU dan Masjumi amat kecil untuk bisa memenangkan pemilihan Wali Kota Surabaya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh NU dan Masjumi adalah mencoba melakukan manuver pada saat pemilihan wali kota di sidang DPRD.

Karena calon wali kota yang diajukan ke sidang pemilihan yang berlangsung 11 Juni 1958 adalah calon tunggal maka PKI beserta partai pendukung yang mencalonkan Satrio menghendaki agar sidang secara aklamasi langsung menetapkan Satrio sebagai wali kota terpilih. Namun NU dan Masjumi yang dipelopori oleh Hamid Rusdi tidak setuju jika Satrio secara aklamasi ditetapkan sebagai wali kota terpilih. Mereka menghendaki agar dilakukan pemilihan secara tertutup (rahasia) dengan prinsip *one man one vote* untuk setiap anggota DPRD.<sup>51</sup> Persoalan tata cara pemilihan sempat menimbulkan perdebatan sengit antara dua kubu tersebut dan nyaris menimbulkan *deadlock*. Sidang yang sudah berlangsung beberapa jam akhirnya diskors untuk menemukan titik temu antara dua kubu yang berbeda pendapat tersebut. Walaupun sidang sudah diskors selama 30 menit tetap saja belum ada titik temu. NU dan Masjumi nampaknya cukup cerdik dalam memainkan arena persidangan. Ketika sidang dibuka kembali dan mereka diberi kesempatan berbicara, Hamid Rusdi sebagai juru bicara NU dan Masjumi bersikukuh bahwa sampai saat pemilihan dilakukan DPRD belum memiliki aturan tentang tata cara pemilihan wali kota.

Kekacauan dalam sidang pemilihan wali kota tersebut disebabkan karena ketidaklaziman tata cara persidangan. Mungkin karena ingin calonnya segera disahkan sebagai wali kota terpilih, ketika sidang baru saja dibuka beberapa anggota dewan yaitu Mudji (PNI), Kwee Mo Liang (Katolik), dan Moh. Djais (PKI) langsung mengusulkan agar agenda pertama adalah pemilihan wali

<sup>51</sup> "Dgn Aklamasi Dr. Satrio Dipilih sbg Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapradja S'bjaja", *Harian Umum*, 12 Juni 1958.

kota.<sup>52</sup> Padahal dalam agenda pertama Surabaya agenda pertama kedua pemilihan calon wali kota anggota dewan tersebut berlangsung tanpa aturan yang ditetapkan oleh anggota dewan akan setuju malam itu.

NU dan Masjumi bersikukuh agar dilakukan pemilihan wali kota (*stembiljet*) karena jabatan wali kota yang menyangkut pilihan atas orang-orang yang akan menjadi bencana bagi Kota Surabaya. Akhirnya pada malam itu akhirnya diputuskan untuk melakukan pemilihan wali kota yang setuju aklamasi dan sidang dilanjutkan dengan dilakukan *voting* mayoritas. Akhirnya secara aklamasi ditetapkan Satrio sebagai Wali Kota Surabaya periode 1958—1963. Pada malam itu maka Kota Surabaya secara resmi dipimpin oleh Samadikun yang mewakili Masyumi. Tahun 1963 Satrio diangkat sebagai Wali Kota Jawa Timur, tetapi dukungan Propinsi Jawa Timur tidak dapat diandalkan, maka yang paling memungk

<sup>52</sup> "Sesudah Debat tentang Pemilihan Wali Kota Surabaya," *Soerabaja Post*, 12 Juni 1958.

<sup>53</sup> "Besok Malam Pilihan Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapradja S'bjaja," *Harian Umum*, 12 Juni 1958.

<sup>54</sup> "Sesudah Debat tentang Pemilihan Wali Kota Surabaya," *Soerabaja Post*, 12 Juni 1958.

<sup>55</sup> Terpilihnya Dr. Satrio sebagai Wali Kota Surabaya pemilihannya tidak sah karena tidak dilakukan secara aklamasi dan tidak didukung oleh mayoritas anggota dewan kota sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam pengesahan dari Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 Juni 1958. "Pendjelasan Ketua DPRD Kota Surabaya," *Terompet Masyarakat*, 24 Juni 1958.

<sup>56</sup> "Kep. Daerah Kotapradja S'bjaja," *Harian Umum*, 1 Juli 1958.



kota.<sup>52</sup> Padahal dalam agenda yang telah disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya agenda pertama adalah merumuskan peraturan tata tertib sidang, kedua pemilihan calon wali kota, dan ketiga pembentukan fraksi DPRD.<sup>53</sup> Usulan anggota dewan tersebut langsung saja disetujui, akibatnya pemilihan wali kota berlangsung tanpa aturan yang jelas. Mungkin mereka berharap bahwa semua anggota dewan akan setuju begitu saja tanpa ada pembahasan yang berlarut-larut.

NU dan Masjumi bersikukuh harus dilakukan pemilihan secara rahasia (*stembiljet*) karena jabatan wali kota adalah jabatan yang penting dan menyangkut pilihan atas orang. Jika anggota dewan salah memilih maka akan menjadi bencana bagi Kota Surabaya. Setelah dilakukan perdebatan berlarut-larut akhirnya diputuskan untuk dilakukan *voting* untuk menentukan berapa yang setuju aklamasi dan siapa yang setuju pemilihan secara tertutup. Setelah dilakukan *voting* mayoritas anggota dewan setuju aklamasi. Akhirnya sidang secara aklamasi menetapkan Dr. R. Satrio Sastrodiredjo sebagai Wali Kota Surabaya periode 1958—1963.<sup>54</sup> Dengan terpilihnya Satrio sebagai wali kota maka Kota Surabaya secara mutlak telah dikuasai oleh PKI.<sup>55</sup> Satrio dilantik sebagai Wali Kota Surabaya pada 30 Juni 1958 oleh Gubernur Jawa Timur Samadikun yang mewakili Menteri Dalam Negeri.<sup>56</sup>

Tahun 1963 Satrio diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebenarnya ia mendapat dukungan kuat dari masyarakat Kota Surabaya sebagai Gubernur Jawa Timur, tetapi dukungan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena DPRD Propinsi Jawa Timur tidak dikuasai oleh PKI tetapi oleh NU. Dengan demikian maka yang paling memungkinkan untuk menjadi Gubernur Jawa Timur adalah

<sup>52</sup> "Sesudah Debat tentang Prosedur Dengan Aklamasi Dr. Satrio Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaya," *Soerabaja Post*, 12 Juni 1958.

<sup>53</sup> "Besok Malam Pilihan Kepala Daerah Kotapradja Surabaya," *Java Post*, 10 Juni 1958.

<sup>54</sup> "Sesudah Debat tentang Prosedur Dengan Aklamasi Dr. Satrio Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaya," *Soerabaja Post*, 12 Juni 1958.

<sup>55</sup> Terpilihnya Dr. Satrio sebagai Wali Kota Surabaya sempat memunculkan isu bahwa tata cara pemilihannya tidak sah karena tidak dilakukan pemilihan tetapi aklamasi. Isu tersebut sempat beredar luas di Kota Surabaya sehingga ketua DPRD perlu melakukan klarifikasi bahwa pemilihan wali kota sudah berjalan sesuai prosedur dan Satrio sah sebagai calon wali kota, dan tinggal menunggu pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. "pendjelasan Ketua DPRD Kotapradja Surabaya," *Java Post*, 25 Juni 1958. "Pendjelasan Ketua DPRD: Pemilihan Kepala Daerah Kopra Surabaya Sepenuhnya Sjah," *Terompet Masyarakat*, 24 Juni 1958.

<sup>56</sup> "Kep. Daerah Kotapradja Surabaya Pertama Hasil Pilihan Rakjat Dilantik Oleh Gub. Samadikun," *Harian Umum*, 1 Juli 1958.



calon yang diajukan oleh NU.<sup>57</sup> Dengan dinamika politik yang berkembang cepat Satrio hanya terpilih sebagai wakil gubernur.

Untuk beberapa saat jabatan Wali Kota Surabaya mengalami kekosongan. Jabatan tersebut baru diisi kembali pada November 1963. Berbeda dengan pemilihan Satrio yang dilakukan melalui sidang DPRD, penggantian Satrio ternyata tidak dilakukan melalui pemilihan tetapi ditunjuk langsung oleh presiden. Berdasarkan usulan PKI dan SOBSI Kota Surabaya, Presiden Sukarno menunjuk Moerachman, S.H. sebagai Wali Kota Surabaya menggantikan Satrio.<sup>58</sup> Moerachman adalah politisi muda alumni Universitas Airlangga. Semasa mahasiswa ia adalah seorang aktifis, anggota CGMI dan pernah memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam Konferensi Mahasiswa Asia Afrika di Bandung. Pada pemilihan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur 1958, ia dicalonkan oleh PKI sebagai anggota dan berhasil terpilih. Walaupun bukan anggota resmi PKI pengangkatannya sebagai Wali Kota Surabaya berdasarkan rekomendasi dari PKI dan SOBSI. PKI yang begitu kuat di Kota Surabaya telah menjadi faktor penentu mengapa Presiden Sukarno mengangkat Moerachman menjadi wali kota. Pengangkatannya sebagai wali kota disambut suka cita oleh masyarakat Surabaya, di mana-mana diselenggarakan selamatan dan pemotongan tumpeng sebagai pernyataan selamat kepadanya.<sup>59</sup> Ucapan selamat terpampang di koran-koran yang menandakan bahwa PKI begitu kuat di Kota Surabaya. Dalam pidato pelantikannya yang dimuat secara berseri di harian *Terompet Masyarakat*, Moerachman mengatakan bahwa dengan berpijak kepada manipol kesulitan akan dapat diatasi.<sup>60</sup>

Berpijak kepada Manipol segala tugas2 dan kesulitan tsb diatas akan dapat diselesaikan atas dasar kerdja sama antara aparat Pemerintah Daerah dgn aparat2 pemerintah lainnja dan antara Pemerintah Daerah dgn kekuatan Rakjat... Kemampuan Kotapradja Surabaya jang terbatas apabila dikombinasikan dengan kekuatan massa rakjat jang penuh daja kreatif akan lebih banjak lagi pekerdjaan2

<sup>57</sup> "Mendukung Dr. Satrio Untuk Tjalon Gupernur", *Terompet Masyarakat*, 25 Maret 1963. "Dr. Satrio Dapat Dukungan kaum Buruh", *Terompet Masyarakat*, 25 Maret 1963. "RK Krembangan Dukung Dr. Satrio", *Terompet Masyarakat*, 10 April 1963.

<sup>58</sup> "Menjambut Pengangkatan Moerachman, S.H. Sbg Wali kota Surabaya", *Terompet Masyarakat*, 28 November 1963.

<sup>59</sup> "Selamatan Menjambut Wali kota Baru", *Terompet Masyarakat*, 14 Desember 1963.

<sup>60</sup> "Pidato Pelantikan Wali kota Murachman, S.H.", *Terompet Masyarakat*, 16—20 Desember 1963.

dapat diselesaikan.<sup>61</sup>

### Catatan Penutup

Eksperimen politik PKI di Kota Surabaya ketika dengan tiba-tiba partai tersebut kehilangan kekuasaan di Jakarta. Aksi yang dilakukan Angkatan Darat yang kemudian berujung pada tandingan yang dilancarkan oleh PKI. Hasil eksperimen politik di Kota Surabaya tiba-tiba lenyap dalam hitungan hari. Tiba-tiba lenyap. Anggota-anggota partai simpatisan partai yang jumlahnya banyak bisa menilai apakah eksperimen politik ini. Perlu dilakukan sebuah penelitian yang terlepas dari keberhasilan atau kegagalan sejarah membuktikan bahwa kemandirian menyatunya rakyat dengan partai politik dimaksudkan untuk membangun bangsa dan mata karena kewajiban sejarah yang telah terpendam. Se

### Daftar Pustaka

- Crouch, Harold, *Militer dan Politik*, Jakarta: 1999.
- Dick, H.W., *Surabaya City of World War II*, Ohio University Press, 2002.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1900—2008*, Sanit, Arbi, *Badai Revolusi: Sejarah Politik dan Sosial di Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Singh, Vishal, "The Political Situation in Surabaya, November 1958."

<sup>61</sup> *Ibid.*



SIGMA  
HERE  
Tanda Tangan

NURSAM

ika politik yang berkembang cepat  
Surabaya mengalami kekosongan.  
ovember 1963. Berbeda dengan  
dang DPRD, penggantian Satrio  
tetapi ditunjuk langsung oleh  
Kota Surabaya, Presiden Sukarno  
Kota Surabaya menggantikan  
ni Universitas Airlangga. Semasa  
CGMI dan pernah memimpin  
ensi Mahasiswa Asia Afrika di  
i Jawa Timur 1958, ia dicalonkan  
Walaupun bukan anggota resmi  
aya berdasarkan rekomendasi  
Surabaya telah menjadi faktor  
kat Moerachman menjadi wali  
but suka cita oleh masyarakat  
tan dan pemotongan tumpeng  
selamat terpampang di koran-  
di Kota Surabaya. Dalam pidato  
harian *Terompet Masyarakat*,  
jak kepada manipol kesulitan  
kesulitan tsb diatas akan dapat  
parat Pemerintah Daerah dgn  
h Daerah dgn kekuatan Rakjat...  
apabila dikombinasikan dengan  
an lebih banjak lagi pekerdjaan2  
*Terompet Masyarakat*, 25 Maret 1963.  
t, 25 Maret 1963. "RK Krembangan  
g Wali kota Surabaya", *Terompet*  
*terompet Masyarakat*, 14 Desember 1963.  
et *Masyarakat*, 16—20 Desember

dapat diselesaikan.<sup>61</sup>

### Catatan Penutup

Eksperimen politik PKI di Kota Surabaya berakhir pada Oktober 1965 ketika dengan tiba-tiba partai ini dituduh melancarkan sebuah aksi perebutan kekuasaan di Jakarta. Aksi yang diawali dengan penculikan tujuh jenderal Angkatan Darat yang kemudian dibunuh menjadi awal petaka besar bagi PKI. Aksi tandingan yang dilancarkan oleh lawan-lawan politik PKI telah menghancurkan hasil eksperimen politik di Kota Surabaya. Maka perjuangan yang amat panjang tiba-tiba lenyap dalam hitungan hari. Moerachman, Wali Kota Surabaya tiba-tiba lenyap. Anggota-anggota dewan juga lenyap, demikian juga anggota dan simpatisan partai yang jumlahnya ratusan ribu lenyap dalam sekejap. Kita tidak bisa menilai apakah eksperimen tersebut berhasil dengan baik atau sebaliknya. Perlu dilakukan sebuah penelitan yang mendalam tentang hal tersebut, tetapi terlepas dari keberhasilan atau kegagalan atas politik PKI di Kota Surabaya, sejarah membuktikan bahwa kebesaran partai politik hanya bisa dicapai dengan menyatunya rakyat dengan pimpinan partai. Sebagai penutup, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membangkitkan luka dan trauma masa lalu tetapi semata-mata karena kewajiban sejarawan untuk membuka mata bangsa terhadap masa lalu yang telah terpendam. Semoga kita mau belajar kepada masa lalu.

### Daftar Pustaka

- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Dick, H.W., *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Athens: Ohio University Press, 2002.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Sanit, Arbi, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.
- Singh, Vishal, "The Political Situation in Indonesia". *International Spatator*, 8 November 1958.

<sup>61</sup> *Ibid.*



**Surat Kabar**

*Harian Umum*, 12 Juni dan 1 Juli 1958.

*Java Post*, 10 September 1955; 21 Mei; 10, 12 dan 25 1958.

*Perdamaian*, 2, 3, 11, 14, 17, 26, dan 31 Mei; 1 dan 3 Oktober 1955; 25 Oktober; 31 Desember 1956.

*Pewarta Soerabaia*, 25 Januari 1957; 26 Februari; 26 Maret 1958.

*Soeara Rakjat*, 23 dan 24 Mei; 15 Juni; 19 dan 27; 10 Agustus 1957; 26 Maret 1958.

*Soerabaja Post*, 7, 8, 14, 16 dan 22 Mei; 19 Juni 1956; 21 Mei; 4 dan 12 Juni 1958.

*Terompet Masyarakat*, 29 April; 16 Mei; 24 Juni 1953; 1958; 25 Maret; 10 April; 28 November; 14, 16—20 Desember 1963.

**"KEMADJOEAN EKONOMI  
RISE AND FALL OFF A PRIBUMI  
FROM**

**Introduction: Pribumi's Entree**

One of the main themes in the history of indigenous (*pribumi*) entrepreneurs are some "stereotypes" developed in Javanese culture is often depicted as noblemen generally despised (especially moneylending) and with all their might against the industrious Chinese, as noted

At an earlier period the Chinese were in the Javanese circles. In the closing years of the colonial place, and the Javanese introduction of the philosophy of the Indonesian

<sup>1</sup> Paper presented at the International Conference on 'The Chinese in Indonesia', Leiden, 18—19 November 1988, on the subject, of which some parts were published in *The Chinese Businessmen of Yogyakarta*, pp. 257—77.

<sup>2</sup> Graduated from History Department in History from National University of Indonesia (NABIL) Foundation, Jakarta during the undergraduate years. Pak Djoko's class on introduction to Indonesian history, D.H. Burger's book—one of the real inspirations in my book. Looking back, perhaps this is not the best choice. In the course of his life, he lived in Penang, Tokyo and Jakarta. *Selamat tinggal dan hormat saya*.

<sup>3</sup> François Raillon, "Can the Javanese Rule Indonesia?", in Hans Antlöv and Sven Söderberg, *Can the Javanese Rule* (Surrey: Curzon Press, 1994), p.



# KOTA-KOTA DI JAWA

IDENTITAS, GAYA HIDUP  
DAN PERMASALAHAN SOSIAL

Studi tentang sejarah perkotaan akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan studi ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan kontemporer tentang masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mulai bergeser ke wilayah perkotaan. Kota-kota di Indonesia mulai bergerak menuju sebuah identitas baru meninggalkan identitasnya yang lama. Perubahan ini hasil dari aplikasi modernisasi yang mulai bergulir sejak awal abad ke-20 dan perubahan pandangan masyarakatnya tentang modernitas itu sendiri. Kosmopolitanisme yang mengasosiasikan diri pada kepemilikan benda-benda simbol modernitas telah menjadi orientasi baru kehidupan masyarakat perkotaan. Pembangunan infrastruktur dan fisik kota pun disesuaikan untuk memenuhi selera kosmopolit yang baru ini. Gaya Tempo Docloe mulai ditinggalkan karena dianggap kuno dan ketinggalan. Gejala-gejala perubahan ini terutama dirasakan di kota-kota tua seperti Solo dan Yogyakarta. Dalam buku ini para sejarawan muda merekonstruksi sejarah kota-kota di Jawa dengan berbagai kompleksitas permasalahannya dari sisi sosial, ekonomi, politik dan budaya.



PENERBIT OMBAK

ISBN 602-8335-28-2



9 786028 335287

SEJARAH KOTA